



# DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**LAKIP  
LAPORAN  
KINERJA  
INSTANSI  
PEMERINTAH**

**TAHUN  
2023**



<https://pupr.kalteng.go.id>



[pupr@kalteng.go.id](mailto:pupr@kalteng.go.id)



[pupr.kalteng@gmail.com](mailto:pupr.kalteng@gmail.com)



(0536) 3235336



@puprkalteng



[puprkaltengberkah](https://www.instagram.com/puprkaltengberkah)



PUPR Kalteng Berkah



<https://bit.ly/youtubepupr>

# KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan pertanggungjawaban atas meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance), maka perlu penerapan sistem yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Provinsi Kalimantan Tengah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 sebagai media akuntabilitas, media hubungan kerja organisasi dan media informasi umpan balik perbaikan kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2023, serta Penetapan Kinerja Tahun 2023 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran dan fungsi sesuai tugas pokok maupun tujuan sebagai jabaran dari visi dan misi Gubernur Kalimantan Tengah.

Diharapkan penyajian LKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcomes* di masa mendatang.

Palangka Raya, 01 Februari 2024  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

H. SHALAHUDDIN, ST., MT  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710721 199803 1 008

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah menuangkan gambaran keberhasilannya maupun masalah dan kendala dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama periode tahun anggaran 2023. Diharapkan LKIP ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan dan umpan balik bagi jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk meningkatkan kinerja masing-masing bidang saat tahun-tahun berikutnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 merupakan Laporan Kinerja Tahun ke-2 periode Renstra (2021-2026) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga di dalam laporan kinerja ini menyajikan ringkasan prestasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah yang dihasilkan di tahun 2023, dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Sasaran 1 : Meningkatnya Konektivitas antar daerah  
Indikator : Persentase jalan dalam kondisi mantap
- b. Sasaran 2 : Meningkatkan kondisi kemantapan jalan provinsi dan kab/kota  
Indikator : Proporsi panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi baik
- c. Sasaran 3 : Meningkatkan aksesibilitas menuju simpul transportasi, fasilitas fasilitas pelayanan dasar publik dan pusat-pusat perekonomian daerah  
Indikator : Persentase jalan provinsi dalam kondisi baik

- d. Sasaran 4 : Persentase akses air minum layak  
Indikator : Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak
- e. Sasaran 5 : Infrastruktur Persampahan yang dibangun /ditingkatkan  
Indikator : Jumlah Infrastruktur Persampahan yang terbangun dan ditingkatkan
- f. Sasaran 6 : Persentase akses sanitasi layak  
Indikator : Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses sanitasi Layak
- g. Sasaran 7 : Panjang drainase yang dibangun/ditingkatkan  
Indikator : Panjang Drainase yang dibangun / ditingkatkan
- h. Sasaran 8 : Pengembangan Kawasan pada Daerah Strategis Provinsi yang terbangun dan terselenggara infrastrukturnya  
Indikator : Jumlah penyelenggaraan infrastruktur permukiman di Kawasan Strategis Provinsi
- i. Sasaran 9 : Bangunan gedung Strategis Provinsi yang dibangun dan ditingkatkan  
Indikator : Jumlah Bangunan Gedung Strategis Provinsi yang dibangun dan ditingkatkan
- j. Sasaran 10 : Bangunan dan lingkungan di Kawasan Strategis Provinsi yang tertata dengan baik  
Indikator : Jumlah Bangunan beserta Lingkungannya yang terbangun dan terkelola dengan baik
- k. Sasaran 11 : Meningkatnya fungsi tata ruang wilayah melalui perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang  
Indikator :
- Jumlah RTR Provinsi/Kab/Kota di Kalimantan Tengah
  - Jumlah Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah
  - Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang
  - Jumlah Peta Analog dan Digital tentang Rencana Tata Ruang dan Tematik

l. Sasaran 12 : Meningkatnya pengelolaan Irigasi dan konservasi SDA yang berkelanjutan

Indikator :

- Rasio Jaringan Irigasi
- Persentase Irigasi Kewenangan Provinsi dalam kondisi baik

m. Sasaran 13 : Terlaksananya pelatihan bagi masyarakat jasa konstruksi

Indikator : Jumlah Masyarakat Jasa Konstruksi yang Terlatih

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah ke depan. Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
I.1 Struktur Organisasi .....	1
I.2 Tugas, Fungsi dan Kewenangan .....	5
I.3 Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan .....	8
I.4 Keuangan .....	10
I.5 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .....	12
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
II.1 Perencanaan Strategis .....	14
II.2 Perjanjian Kinerja 2023 .....	17
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
III.1 Capaian Kinerja Tahun 2023 .....	29
III.2 Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis .....	32
III.2.1 Sasaran Meningkatnya Konektivitas antar daerah .....	33
III.2.2 Sasaran Meningkatkan aksesibilitas menuju simpul transportasi, fasilitas-fasilitas pelayanan dasar publik dan pusat-pusat perekonomian daerah .....	34
III.2.3 Sasaran Persentase akses air minum layak .....	37
III.2.4 Sasaran Infrastruktur Persampahan yang dibangun/ditingkatkan .....	41
III.2.5 Sasaran Persentase akses sanitasi layak .....	41
III.2.6 Sasaran Panjang drainase yang dibangun/ditingkatkan .....	44
III.2.7 Sasaran Pengembangan Kawasan pada Daerah Strategis Provinsi yang terbangun dan terselenggara infrastrukturnya .....	46
III.2.8 Sasaran Bangunan gedung Strategis Provinsi yang dibangun dan ditingkatkan .....	47
III.2.9 Sasaran Bangunan dan lingkungan di Kawasan Strategis Provinsi yang tertata dengan baik .....	47
III.2.10 Sasaran Meningkatnya fungsi tata ruang wilayah melalui perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang .....	48

III.2.11	Sasaran Meningkatnya pengelolaan jaringan irigasi dan konservasi Sumber Daya Air yang berkelanjutan .....	50
III.2.12	Sasaran Terlaksananya pelatihan bagi masyarakat jasa konstruksi ....	52
III.3	Akuntabilitas Anggaran .....	52
BAB IV PENUTUP		
IV.1	Kesimpulan dan Saran .....	54
LAMPIRAN- LAMPIRAN		

## DAFTAR TABEL

Tabel.I.4	Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah .....	11
Tabel.II.1	Sasaran Strategis dalam waktu lima tahun sesuai RPJMD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah .....	15
Tabel.II.2.1	Perjanjian Kinerja Eselon II Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah .....	18
Tabel.II.2.2	Perjanjian Kinerja Eselon III Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah .....	19
Tabel.II.2.3	Perjanjian Kinerja Eselon IV Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah .....	22
Tabel.III.1	Capaian Kinerja Tahun 2022 .....	29
Tabel.III.2.1	Target dan Realisasi Kinerja Meningkatnya Porsentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik .....	33
Tabel.III.2.1.a	Status Jalan Provinsi Berdasarkan Type Permukaan dalam Kilometer .....	34
Tabel.III.2.1.b	Status Jalan Provinsi Berdasarkan Kondisi dalam Kilometer .....	34
Tabel.III.2.2.a	Target dan Realisasi Kinerja Tersedianya Konektivitas Wilayah Provinsi .....	34
Tabel.III.2.2.b	Panjang Jalan Provinsi per Wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah dalam Kilometer .....	37
Tabel.III.2.3.a	Target dan Realisasi Kinerja Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Air Minum Layak Provinsi Kalimantan Tengah .....	38
Tabel.III.2.3.b	Persentase rumah tangga menurut Kabupaten/Kota dan sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk minum di Provinsi Kalimantan Tengah .....	39
Tabel.III.2.3.c	Persentase rumah tangga menurut Kabupaten/Kota, sumber air minum bersih dan akses air minum layak di Provinsi Kalimantan Tengah .....	40
Tabel.III.2.3.d	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan air minum layak menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan	41

	Tengah, 2019-2023 .....	
Tabel.III.2.4	Target dan Realisasi Kinerja Pembangunan Infrastruktur Persampahan di Provinsi Kalimantan Tengah .....	41
Tabel.III.2.5.a	Target dan Realisasi Kinerja Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sanitasi Layak Provinsi Kalimantan Tengah .....	42
Tabel.III.2.5.b	Persentase rumah tangga menurut Kabupaten/Kota dan tempat pembuangan akhir tinja di Provinsi Kalimantan Tengah .....	43
Tabel.III.2.5.c	Persentase rumah tangga menurut Kabupaten/Kota dan jenis kloset yang digunakan rumah tangga di Provinsi Kalimantan Tengah .....	43
Tabel.III.2.5.d	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, 2019-2023 .....	44
Tabel.III.2.6.a	Target dan Realisasi Kinerja Meningkatnya Kualitas dan Fungsi Saluran drainase .....	45
Tabel.III.2.7.a	Target dan Realisasi Kinerja penyelenggaraan infrastruktur dipermukiman di Kawasan Strategis Provinsi Kalimantan Tengah.....	46
Tabel.III.2.8.a	Target dan Realisasi Kinerja Pembangunan dan Peningkatan Gedung Strategis Provinsi Kalimantan Tengah .....	47
Tabel. III.2.9.a	Target dan Realisasi capaian Kinerja pembangunan bangunan dan lngkungannya pada Kwasan Strategis di Provinsi Kalimantan Tengah .....	48
Tabel. III.2.10.a	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Informasi Ruang .....	49
Tabel. III.2.11.a	Target dan Realisasi Kinerja Meningkatnya Prosentase jaringan Irigasi dalam kondisi baik .....	50
Tabel. III.2.12	Target dan Realisasi Kinerja Terlaksananya pelatihan bagi masyarakat jasa konstruksi .....	52
Tabel. III.3.1	Target/Pagu dan Realisasi Keuangan Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah .....	53
Tabel. III.3.1.a	Realisasi Keuangan Sumber Dana APBD-P Tahun 2022 dan APBD-P Tahun 2023 Di nas PUPR Provinsi Kalteng .....	53

Tabel. IV.1	Capaian Kinerja Tahun 2023 .....	54
-------------	----------------------------------	----

# BAB I PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 dibuat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*).

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan syarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita pembangunan. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara akuntabel dan transparansi. Perlunya sistem pertanggungjawaban daerah atas segala proses tindakan-tindakan yang dibuat dalam rangka tata tertib menuju instrumen akuntabilitas daerah.

Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 ini:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan harus dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Mendorong Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai salah satu upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan lagi kinerjanya.

## I.1 STRUKTUR ORGANISASI

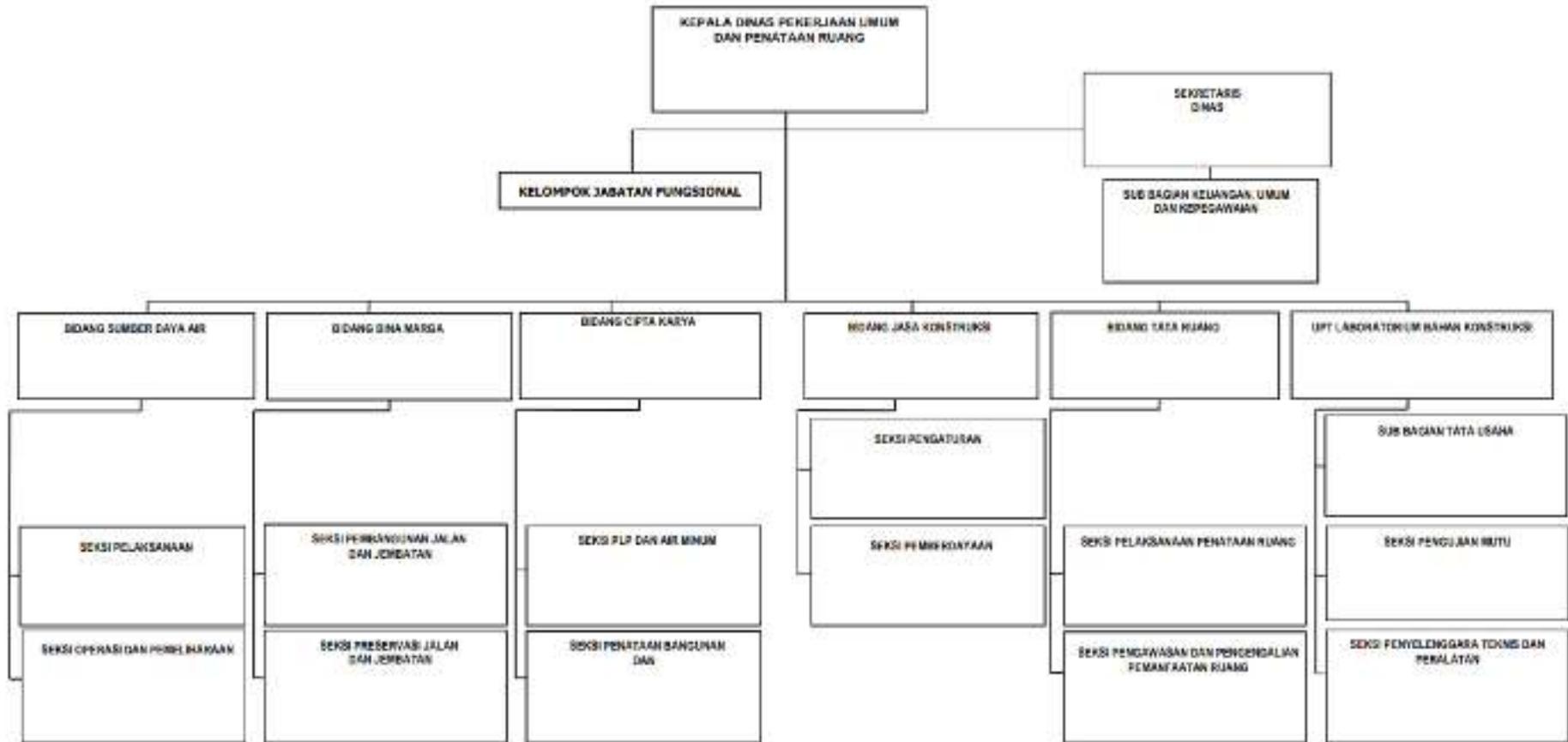
Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah No. 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah dan

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Bahan Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  1. Sub Bagian Penyusunan Program;
- c. Bidang-bidang terdiri dari :
  1. Bidang Sumber Daya Air, membawahi :
    - a) Seksi Pelaksanaan;
    - b) Seksi Operasi dan Pemeliharaan.
  2. Bidang Bina Marga, membawahi :
    - a) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
    - b) Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.
  3. Bidang Cipta Karya, membawahi :
    - a) Seksi (PLP) dan Air Minum;
    - b) Seksi Penataan Bangunan dan Bangkim.
  4. Bidang Jasa Konstruksi, membawahi :
    - a) Seksi Pengaturan;
    - b) Seksi Pemberdayaan;
  5. Bidang Tata Ruang, membawahi :
    - a) Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang;
    - b) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
  6. UPT Laboratorium Bahan Konstruksi, membawahi :
    - a) Sub Bagian Tata Usaha;
    - b) Seksi Pengujian Mutu;
    - c) Seksi Penyelenggara Teknis dan Peralatan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari :
  1. Pembina Jasa Konstruksi Ahli Utama;
  2. Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya
  3. Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda
  4. Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama
  5. Teknik Tata Bangunan & Perumahan Utama
  6. Teknik Tata Bangunan & Perumahan Madya

7. Teknik Tata Bangunan & Perumahan Muda
8. Teknik Tata Bangunan & Perumahan Pertama
9. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
10. Teknik Pengairan ahli Utama
11. Teknik Pengairan ahli Madya
12. Teknik Pengairan ahli Muda
13. Teknik Pengairan Pertama
14. Penata Ruang ahli Madya
15. Penata Ruang ahli Muda
16. Penata Ruang ahli Pertama
17. Analis Pengelolaan Sumber Daya Air

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



Berikut ini Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah:

## I.2 TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

### 1. Tugas

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai Tugas Pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya tertuang dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah No. 37 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah.

### 2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Pembinaan dan penyusunan perencanaan dan program;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan pengembangan konstruksi;
- 4) Pembinaan dan pelaksanaan pengembangan tata ruang;
- 5) Pemberian rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pengawasan;
- 6) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas; dan
- 7) Pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

### 3. Kewenangan

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Provinsi;
- 2) Penyusunan dan penetapan Rencana Kawasan Strategis, Rencana Detail Tata Ruang untuk RTRWP;
- 3) Penyusunan program dan anggaran Provinsi di bidang penataan ruang;
- 4) Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi termasuk lintas kabupaten/kota;
- 5) Pengoordinasian penyelenggaraan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
- 6) Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang;
- 7) Penyediaan bantuan/dukungan penerapan hasil penelitian dan pengembangan teknologi, arsitektur bangunan dan jati diri kawasan;
- 8) Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah skala Provinsi dan lintas kabupaten/kota;
- 9) Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air dan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
- 10) Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di wilayah Provinsi dan atau pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
- 11) Pembentukan Komisi Irigasi Provinsi dan pengesahan pembentukan Komisi Irigasi kabupaten/kota;
- 12) Penetapan dan pemberian izin dan rekomendasi teknis atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusaha sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
- 13) Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota dan pemberian bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada kabupaten/kota penyediaan fasilitasi penyelesaian sengketa dalam pengelolaan sumber daya air antar kabupaten/kota;
- 14) Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, perubahan dan atau pembongkaran bangunan dan atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder lintas kabupaten/kota;
- 15) Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan

sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 Ha sampai dengan 3000 Ha atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas kabupaten/kota;

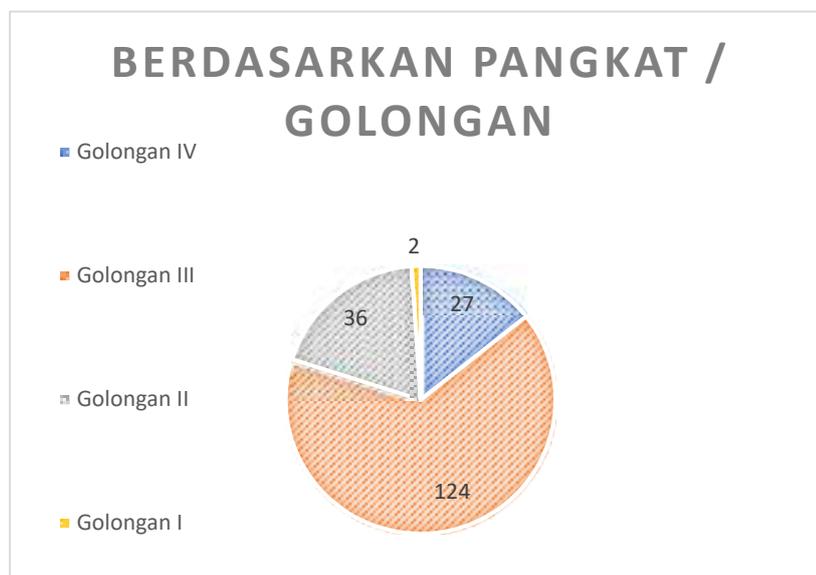
- 16) Pengaturan jalan provinsi meliputi perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan, penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan Provinsi, penetapan fungsi jalan yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, antar kabupaten/kota, jalan lokal dan jalan lingkungan, penetapan status jalan dan penyusunan perencanaan umum pembiayaan jaringan jalan provinsi;
- 17) Pembinaan jalan Provinsi, fasilitasi penyelesaian sengketa antar Kabupaten/Kota dan pengembangan teknologi terapan di bidang jalan kabupaten/kota;
- 18) Pembangunan dan pengawasan jalan provinsi;
- 19) Penetapan kebijakan dan strategi wilayah Provinsi dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan;
- 20) Fasilitasi penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan jangka panjang dan menengah kabupaten/kota;
- 21) Pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan;
- 22) Pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan di provinsi;
- 23) Penetapan Peraturan Daerah kebijakan pengembangan persampahan, air minum dan air limbah lintas kabupaten/kota di provinsi, pemberian izin penyelenggara pengelolaan persampahan lintas kabupaten/kota;
- 24) Pembangunan, pengawasan dan pengendalian pengembangan persampahan, air minum dan air limbah di wilayah provinsi dan evaluasi penyelenggaraan yang bersifat lintas kabupaten/kota;
- 25) Pengaturan pembinaan penyelenggara drainase dan pemantusan galangan di wilayah provinsi;
- 26) Pembangunan dan pengawasan drainase dan pengendalian banjir lintas kabupaten/kota;
- 27) Penetapan Peraturan Daerah Provinsi tentang bangunan gedung dan lingkungan, penetapan kebijakan strategi wilayah Provinsi dan penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan skala provinsi atau lintas kabupaten/kota;

- 28) Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi sertifikasi tenaga ahli konstruksi, sistem informasi jasa konstruksi dan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi skala provinsi.

### I.3 SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN KELENGKAPAN

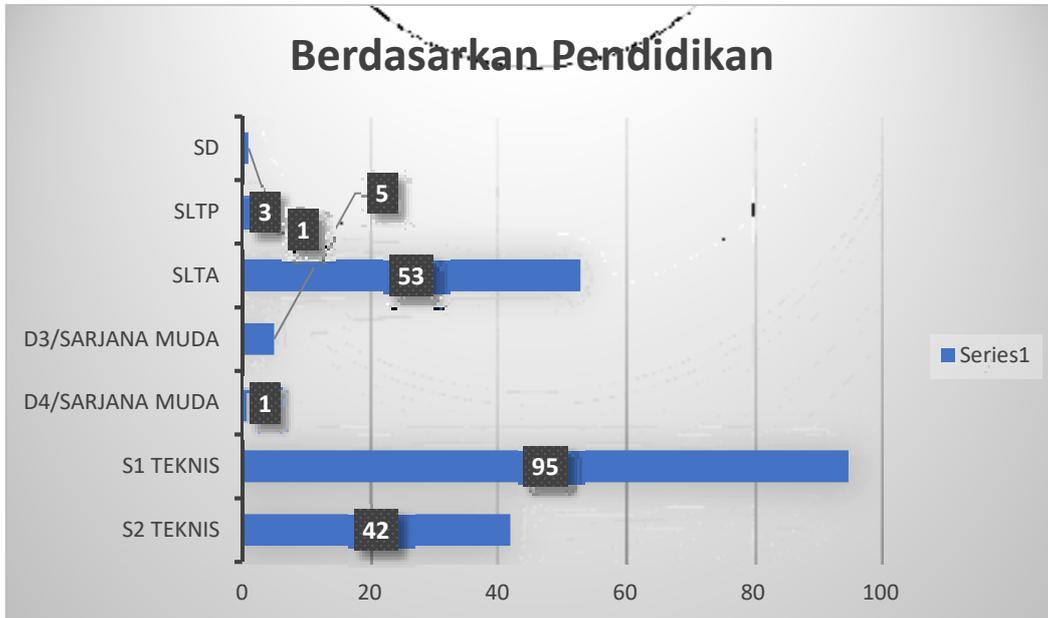
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah dipimpin oleh Kepala Dinas (Eselon II), untuk melaksanakan tugas dan fungsi di sekretariat dan bidang serta UPT, dibantu 7 pejabat Eselon III, terdiri dari 1 (satu) Sekretaris membawahi 2 (dua) pejabat Eselon IV, 5 (lima) Kepala Bidang dan 1 (satu) Kepala UPT, masing-masing membawahi 3 (tiga) pejabat Eselon IV. Adapun rincian sumber daya manusia pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah PNS sebanyak 201 Orang
- b. Berdasarkan Pangkat/Golongan
  - 1). Golongan IV : 27 Orang
  - 2). Golongan III : 124 Orang
  - 3). Golongan II : 36 Orang
  - 4). Golongan I : 2 Orang



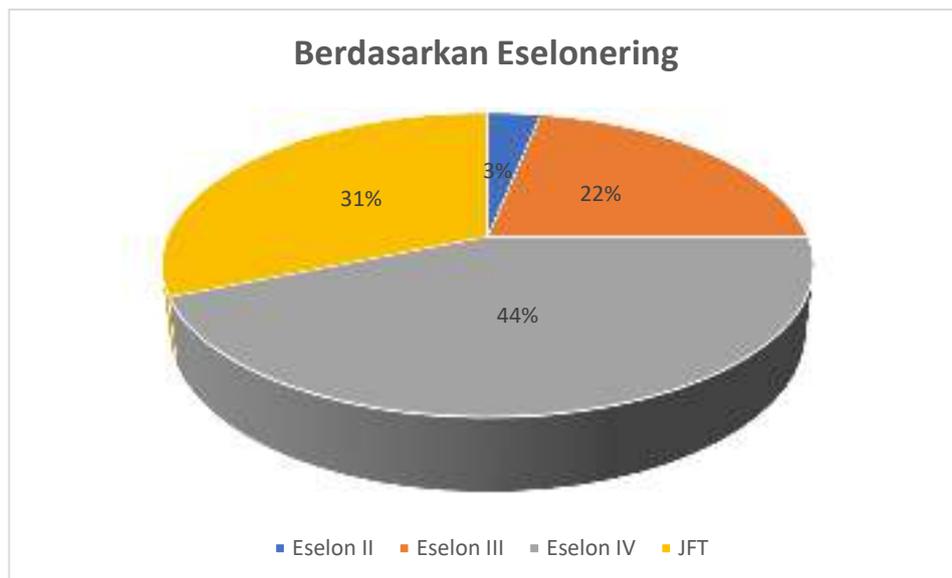
- c. Berdasarkan Pendidikan
  - 1). S2 Teknis : 48 Orang
  - 2). S1 Teknis : 85 Orang
  - 3). D4/Sarjana Muda : 1 Orang
  - 3). D3/Sarjana Muda : 5 Orang
  - 4). SLTA : 46 Orang

- 5). SLTP : 3 Orang
- 6). SD : 1 Orang



d. Berdasarkan Eselonering

- 1). Eselon II : 1 Orang
- 2). Eselon III : 7 Orang
- 3). Eselon IV : 14 Orang
- 4). JFT : 10 Orang



## e. Keberadaan Jabatan Fungsional

Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah terdapat Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), sebagai berikut :

- Penata Ruang Madya 1 (satu) orang;
- Pembina jasa konstruksi ahli muda 1 (satu) orang
- Teknik tata bangunan dan perumahan muda 1 (satu) orang;
- Pengelola pengadaan barang/jasa 1 (satu) orang;
- Teknik pengajaran ahli muda 1 (satu) orang;
- Teknik pengajaran pertama 2 (dua) orang;
- Penata ruang Pertama 2 (dua) orang;
- Pengelolaan sumber daya air 1 (satu) orang.

-

## I.4 KEUANGAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejumlah Rp. 1.457.451.485.846,- dan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2021 ada pengurangan menjadi Rp. 1.284.495.891.186,- dengan rincian yang disajikan pada Tabel I.4 berikut ini:

**Tabel.I.4. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023**

4	<b>PENDAPATAN</b>	
4.1	Pendapatan Asli Daerah	<b>768.372.000</b>
4.1.2	Realisasi Pendapatan	786.372.000
	<b>APBD TA. 2023</b>	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	
5.1	<b>Belanja Operasi</b>	<b>421.976.306.610</b>
5.1.1	- Belanja Pegawai	29.146.540.136
5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	160.209.966.474
5.1.5	- Belanja Hibah	232.619.800.000
5.2	<b>Belanja Modal</b>	<b>1.035.475.179.236</b>
5.2.1	- Belanja Modal Tanah	-
5.2.2	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.758.373.000
5.2.3	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	502.796.700.000
5.2.4	- Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	528.920.106.236
	<b>Rp.</b>	<b>1.457.451.485.846</b>
	<b>APBD-Perubahan TA. 2023</b>	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	
5.1	<b>Belanja Operasi</b>	<b>385.808.013.024</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	27.933.023.136
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	152.935.907.890
5.1.5	Belanja Hibah	204.939.087.998
5.2	<b>Belanja Modal</b>	<b>898.687.891.186</b>
5.2.1	- Belanja Modal Tanah	4.500.000.000
5.2.2	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.104.423.000
5.2.3	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	401.309.174.925
5.2.4	- Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	491.774.280.237
	<b>Rp.</b>	<b>1.284.495.891.186</b>

## I.5 SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah ini telah mengacu kepada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara rewiu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### IKHTISAR EKSEKUTIF

#### Bab I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

#### Bab II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

#### Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

##### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja sera capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar

nasional (jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

#### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

#### Bab IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

#### LAMPIRAN :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

# BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

## II.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah telah disusun secara konkrit dan sistematis dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026. Rencana Strategis menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk Tahun 2021-2026 dengan memperhitungkan lokasi, peluang dan kendala yang ada.

Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2023 akan dijelaskan dalam sub bab berikutnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah.

Seperti yang tertuang dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, terdapat tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah yang mengacu pada misi Gubernur Kalimantan Tengah, yaitu sebagai berikut:

**1. Mempercepat pembangunan ekonomi yang produktif, kreatif dan berwawasan lingkungan.**

Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

- Meningkatnya konektivitas wilayah,
- Meningkatnya pengelolaan jaringan irigasi dan konservasi Sumber Daya Air yang berkelanjutan,
- Meningkatnya fungsi tata ruang Wilayah Provinsi.

**2. Memperkuat ketahanan Daerah dalam mengantisipasi perubahan global.**

Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

- Pemenuhan pelayanan dasar perumahan, air minum dan sanitasi.

Tabel II.1 Sasaran Strategis Dalam Waktu Lima Tahun Sesuai RPJMD 2021-2026

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET TAHUNAN				
				2022	2023	2024	2025	2026
	Terwujudnya Prasarana dan Sarana Umum baik dan layak secara keseluruhan menyatu yang bisa dipergunakan oleh masyarakat di wilayah Kalimantan Tengah.	Meningkatnya Konektivitas antar daerah	- Persentase jalan dalam kondisi mantap (%)	85,32	85,61	86,01	87,20	89,91
- Proporsi panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi baik			0,42	0,43	0,45	0,47	0,47	
- Persentase jalan provinsi dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )			41,53	43,20	45,35	46,72	47,18	
	Menyediakan akses air minum layak	Persentase akses air minum layak	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak (%)	90,56	95,28	100	100	100
	Membangun/meningkatkan infrastruktur persampahan beserta sarana dan prasarananya	Infrastruktur Persampahan yang dibangun/ditingkatkan	Jumlah Infrastruktur Persampahan yang terbangun dan ditingkatkan (unit)	2	3	4	5	6
	Menyediakan akses sanitasi layak	Persentase akses sanitasi layak	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses sanitasi Layak (%)	72	76	80	85	90
	Membangun/meningkatkan drainase untuk mengurangi/genangan/banjir	Panjang drainase yang dibangun/ditingkatkan	Panjang Drainase yang dibangun / ditingkatkan (meter)	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000
	Membangun/menyelenggarakan infrastruktur untuk pengembangan Kawasan pada Daerah Strategis Provinsi	Pengembangan Kawasan pada Daerah Strategis Provinsi yang terbangun dan terselenggara infrastrukturnya	Jumlah penyelenggaraan infrastruktur permukiman di Kawasan Strategis Provinsi (kawasan)	3	4	5	6	7
	Membangun/meningkatkan bangunan gedung strategis Provinsi	Bangunan gedung Strategis Provinsi yang dibangun dan ditingkatkan	Jumlah Bangunan Gedung Strategis Provinsi yang dibangun dan ditingkatkan (unit)	7	8	9	10	11

	Menata bangunan dan lingkungannya pada Kawasan Strategis Provinsi	Bangunan dan lingkungan di Kawasan Strategis Provinsi yang tertata dengan baik	Jumlah Bangunan beserta Lingkungannya yang terbangun dan dikelola dengan baik (unit)	6	7	8	9	10
	Terwujudnya peningkatan fungsi tata ruang wilayah	Meningkatnya fungsi tata ruang wilayah melalui perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Jumlah RTR Provinsi/Kab/Kota di Kalimantan Tengah (Perda/Perkada)	6	9	12	14	16
			Jumlah Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah (Kabupaten/kota)	14	14	14	14	14
			Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (Persentase)	50	55	60	65	70
			Jumlah Peta Analog dan Digital tentang Rencana Tata Ruang dan Tematik (Informasi)	60	60	60	60	60
	Terlaksananya pengelolaan jaringan irigasi dan konservasi Sumber Daya Air	Meningkatnya pengelolaan irigasi dan konservasi SDA yang berkelanjutan	Rasio Jaringan Irigasi (%)	23,85	24,49	24,89	25,38	25,75
			Persentase Irigasi Kewenangan Provinsi dalam kondisi baik (%)	77,45	77,56	77,63	77,69	77,77
	Menyiapkan pelaku Jasa Konstruks yang berkualitas	Terlaksananya pelatihan bagi masyarakat jasa konstruksi	Jumlah Masyarakat Jasa Konstruksi yang Terlatih (orang)	830	1080	1330	1730	2130

## II.2 PERJANJIAN KINERJA 2023

Sasaran dari respon arah Pembangunan Daerah ini adalah pemenuhan secara tepat akan kebutuhan sarana dan prasarana umum bagi masyarakat, ketepatan ini mencakup waktu, kualitas dan kuantitas.

Ketepatan waktu adalah kepastian sampai kapan atau kapan penyediaan sarana dan prasarana umum yang dimaksudkan akan dilaksanakan atau direalisasikan. Masyarakat akan dijamin dengan kepastian, bukan penantian yang tidak berujung.

Ketepatan kualitas artinya bahwa kualitas pelayanan penyediaan sarana dan prasarana umum bagi masyarakat akan dijamin dengan tingkat kualitas yang baik. Jaminanan kualitas ini diharapkan mampu memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat, sehingga masyarakat memberikan apresiasi yang cukup tinggi karena kualitas pelayanan tersebut. Ketepatan kuantitas adalah jumlah layanan yang diberikan kepada masyarakat sama dengan jumlah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sedangkan ketepatan lokasi adalah menunjuk lokasi yang benar atau tepat sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat dalam pemberian layanan oleh Pemerintah.

Pada prinsipnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan selalu memperhatikan 4 (empat) ketepatan tersebut di atas. Kendala utama dalam memenuhi keempat ketepatan tersebut adalah pendanaan, sehingga selalu ada tarik menarik (*trade off*) dalam memenuhi kriteria ketepatan tersebut. Akan tetapi sudah barang tentu, bahwa pilihan akan selalu dijatuhkan pada layanan yang paling baik dan paling optimal yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada masyarakatnya.

Pada Tahun 2023 Indikator Kinerja diuraikan menjadi beberapa bagian sehingga pengukuran dapat dilakukan dan lebih akurat hasil pengukurannya, dengan diuraikannya indikator kinerja maka target yang dicapai dibagi sesuai dengan indikator kinerja yang dimaksud. Penguraian Indikator Kinerja dan perubahan target diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih akuntabel dari kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah.

Berikut ini adalah tabel Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Eselon :

**Tabel II.2.1 Perjanjian Kinerja Eselon II Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Konektivitas antar daerah	- Persentase jalan dalam kondisi mantap (%)	85,32 %
2	Meningkatkan kondisi kemantapan jalan provinsi dan kab/kota.	- Proporsi panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi baik	0,42
3	Meningkatkan aksesibilitas menuju simpul transportasi, fasilitas-fasilitas pelayanan dasar publik dan pusat-pusat perekonomian daerah.	- Persentase jalan provinsi dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )	41,53
4	Persentase akses air minum layak	- Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak (%)	90,56 %
5	Infrastruktur Persampahan yang dibangun /ditingkatkan	- Jumlah Infrastruktur Persampahan yang terbangun dan ditingkatkan (unit)	2 unit
6	Persentase akses sanitasi layak	- Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses sanitasi Layak (%)	72 %
7	Panjang drainase yang dibangun/ditingkatkan	- Panjang Drainase yang dibangun / ditingkatkan (meter)	2000 meter
8	Pengembangan Kawasan pada Daerah Strategis Provinsi yang terbangun dan terselenggara infrastrukturnya	- Jumlah penyelenggaraan infrastruktur permukiman di Kawasan Strategis Provinsi (kawasan)	3 kawasan
9	Bangunan gedung Strategis Provinsi yang dibangun dan ditingkatkan	- Jumlah Bangunan Gedung Strategis Provinsi yang dibangun dan ditingkatkan (unit)	7 unit
10	Bangunan dan lingkungan di Kawasan Strategis Provinsi yang tertata dengan baik	- Jumlah Bangunan beserta Lingkungannya yang terbangun dan terkelola dengan baik (unit)	6 unit
11	Meningkatnya fungsi tata ruang wilayah melalui perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	- Jumlah RTR Provinsi/Kab/Kota di Kalimantan Tengah (Perda/Perkada)	6 Perda/Perkada
		- Jumlah Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah (Kabupaten/kota)	14 Kabupaten/kota
		- Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (Persentase)	50 %
		- Jumlah Peta Analog dan Digital tentang Rencana Tata Ruang dan Tematik (Informasi)	60 Informasi

12	Meningkatnya pengelolaan Irigasi dan konservasi SDA yang berkelanjutan	- Rasio Jaringan Irigasi (%)	23,85 %
		- Persentase Irigasi Kewenangan Provinsi dalam kondisi baik (%)	77,45 %
13	Terlaksananya pelatihan bagi masyarakat jasa konstruksi	- Jumlah Masyarakat Jasa Konstruksi yang Terlatih (orang)	830 orang

**Tabel II.2.2 Perjanjian Kinerja Eselon III Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian	100 %	SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
		- Presentase dokumen laporan keuangan yang berkualitas baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku	100 %	
		- Presentase dokumen perencanaan dan Pelaporan tentang penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dan sesuai aturan yang berlaku	100 %	
2	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Rencana, kebijakan, strategi dan teknis system pengembangan jaringan Jalan	- Jumlah dokumen penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis system pengembangan jaringan jalan	2 dokumen	BIDANG BINA MARGA
3	Terlaksananya kegiatan pengembangan Leger Jalan	- Jumlah dokumen Leger Jalan	1 Dokumen	
4	Merencanakan Kegiatan Program Kerja Pembangunan Jalan dan Jembatan Berdasarkan Prioritas Target Sasaran yang akan dicapai	- Jumlah Dokumen Program Kerja Pembangunan Jalan dan Jembatan Pertahun Anggaran	1 Dokumen	
5	Melakukan Pengumpulan dan Pengolahan Data Keadaan jalan dan jembatan	- Jumlah Dokumen keadaan jalan dan Jembatan	1 Dokumen	
6	Merencanakan program kerja preservasi jalan dan jembatan di jalan	- Jumlah dokumen program kerja perencanaan preservasi jalan dan	1 Dokumen	

	provinsi pertahun anggaran	jembatan pertahun		
7	Melaksanakan pemantauan / monitoring dan evaluasi kinerja preservasi jalan dan jembatan	- Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi	1 Dokumen	
8	Melapor Pelaksanaan kegiatan jalan dan jembatan secara tertulis maupun lisan kepada atasan sesuai hasil yang dicapai	- Jumlah dokumen capaian pertahun berdasarkan hasil monitoring evaluasi	1 Dokumen	
9	Melaksanakan program pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum	- Presentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak	95,28 %	BIDANG CIPTA KARYA
10	Melaksanakan program pengembangan system dan pengelolaan persampahan regional	- Jumlah infrastruktur persampahan yang terbangun dan ditingkatkan	3 unit	
11	Melaksanakan program pengelolaan dan pengembangan system air limbah	- Presentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak	76 %	
12	Melaksanakan Program pengelolaan dan pengembangan system drainase	- Panjang drainase yang dibangun/ditingkatkan	3000 meter	
13	Melaksanakan program pengembangan permukiman	- Jumlah penyelenggaraan	4 kawasan	
14	Melaksanakan program penataan bangunan Gedung	- Jumlah bangunan Gedung strategis provinsi yang dibangun dan ditingkatkan	8 unit	
15	Melaksanakan program penataan bangunan dan lingkungannya	- Jumlah bangunan beserta lingkungannya yang terbangun dan terkelola dengan baik	7 unit	
16	Terlaksananya pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas daerah kabupaten/kota	- Dokumen pengelolaan prasarana sumber daya air dan peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air kewenangan provinsi	1 laporan	BIDANG SUMBER DAYA AIR
		- Terbangunnya bangunan pintu air / bendung pengedali banjir	7 buah	
		- Terbangunnya bangunan breakwater	113 meter	

17	Melaksanakan persetujuan substansi, evaluasi dan penetapan RTRW provinsi	- Jumlah dokumen revisi rencana tata ruang	1 Dokumen	BIDANG TATA RUANG
18	Melaksanakan penetapan kebijakan dalam ranka pelaksanaan penataan ruang	- Jumlah dokumen kebijakan perda/pergub selain RTRW	1 Dokumen	
19	Melaksanakan penetapan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penataan ruang	- Jumlah dokumen sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	1 Dokumen	
20	Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW provinsi	- Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW Provinsi	1 Dokumen	
21	Melaksanakan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RTRW dan RRTR kabupaten/kota	- Jumlah dokumen hasil evaluasi rancangan peraturan daerah RTRW dan RRTW Kabupaten/kota	1 Dokumen	
22	Melaksanakan peningkatan peran masyarakat dalam penataan ruang	- Jumlah laporan peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat	1 Dokumen	
23	Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah	- Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil koordinasi investasu dan pembangunan daerah	1 Dokumen	
24	Melaksanakan updating system informasi penataan ruang	- Jumlah dokumen system informasi penataan ruang	1 Dokumen	
25	Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemberiang insentif dan disinsentif bidang penataan ruang	- Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pemberian insentif dan disinsentif bidang penataan ruang	1 Dokumen	
26	Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penertiban dan penagakan hokum bidang penataan ruang	- Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penertiban dan penegakan hokum bidang penataan ruang	1 Dokumen	
27	Penyiapan training need assessment (TNA) pelatihan tenaga ahli konstuksi	- Jumlah laporan penyiapan Training Need Assesment (TNA) pelatihan tenaga ahli konstruksi	1 Laporan	BIDANG JASA KONSTRUKSI
28	Penyiapan instruktur / asesor/penyelenggaraan pelatihan	- Jumlah instruktur/asesor penyelenggaraan pelatihan yang terlatih	30 Orang	
29	Identifikasi potensi kerjasama dan pemberdayaan jasa	- Jumlah tenaga terampil yang tersertifikasi secara on site	90 orang	

	konstruksi			
30	Fasilitasi sertifikasi tenaga ahli konstruksi	- Jumlah tenaga ahli yang tersertifikasi	30 Orang	
31	Pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi	- Jumlah peserta yang mengikuti forum jasa konstruksi daerah	40 Orang	
		- Jumlah laporan hasil koordinasi dan pembinaan jasa konstruksi	1 Laporan	
		- Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	60 orang	
		- Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis	40 orang	
		- Jumlah peserta yang mengikuti sertifikasi	10 Orang	
32	Penyelenggaraan pelatihan untuk peningkatan kapasitas administrator SIPJAKI	- Jumlah laporan pelatihan dan monitoring system informasi pembinaan jasa konstruksi (SIPJAKI)	1 Laporan	
32	Penyediaan data dan informasi jasa konstruksi	- Jumlah laporan penyediaan data dan informasi jasa konstruksi	1 laporan	
33	Pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi pada APBD provinsi	- Jumlah laporan pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi pada APBD provinsi	1 Laporan	
34	Penyelenggaraan system informasi jasa konstruksi (SIPJAKI) cakupan daerah provinsi	- Jumlah pengadaan dan pemeliharaan kalibrasi peralatan laboratorium bahan konstruksi	2 Alat Uji	UPT LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
		- Jumlah dokumen penyiapan akreditasi laboratorium bahan konstruksi	1 Dokumen	
35	Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi	- Jumlah dokumen penguatan penyelenggaraan UPT Laboratorium bahan konstruksi	1 Dokumen	

**Tabel II.2.3 Perjanjian Kinerja Eselon IV Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya pelayanan administrasi Umum dan Kepegawaian	- Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian dengan baik	222 orang	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian
2	Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan	- Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang sesuai dengan pedoman dan tepat waktu	2 Dokumen	
3	Terlaksananya pengelolaan sarana dan prasarana kantor	- Pencatatan buku barang inventaris kantor	1 tahun	
		- Membuat laporan barang inventaris kantor dan mengumpulkan data barang/asset milik kantor	1 tahun	
5	Merencanakan program kerja pertahun anggaran seksi pembangunan jalan dan jembatan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai	- Jumlah laporan program kerja seksi pembangunan jalan dan jembatan pertahun anggaran	1 Laporan	Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
6	Melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta monitoring jalan dan jembatan pada ruas jalan provinsi	- Jumlah laporan kondisi jalan dan jembatan	1 Laporan	
7	Melaporkan pelaksanaan kegiatan yang berada dibawah koordinasi seksi pembangunan jalan dan jembatan, secara tertulis ataupun lisan kepada atasan	- Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan	12 Laporan	
8	Merencanakan program kerja preservasi jalan dan jembatan di jalan provinsi pertahun anggaran	- Jumlah dokumen program kerja perencanaan preservasi jalan dan jembatan pertahun anggaran	1 Laporan	Kepala Seksi Preservasi Jalan Dan Jembatan
9	Melaksanakan pemantauan/monitoring dan evaluasi kinerja preservasi jalan dan jembatan	- Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi	1 Laporan	
10	Melapor pelaksanaan kegiatan jalan dan jembatan secara tertulis maupun lisan kepada atasan sesuai hasil yang	- Jumlah dokumen capaian pertahun berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi	1 Laporan	

	dicapai			
11	Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis daerah provinsi	- Jumlah penyelenggaraan infrastruktur permukiman di Kawasan strategis provinsi	4 kawasan	Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Bangkim
12	Melaksanakan kegiatan penetapan dan penyelenggaraan bangunan Gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi	- Jumlah bangunan Gedung strategis provinsi yang dibangun dan ditingkatkan	8 unit	
13	Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota	- Jumlah bangunan beserta lingkungannya yang terbangun dan terkelola dengan baik	7 Unit	
14	Melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) lintas kabupaten/kota	- Presentase rumah tangga	95,28 %	Kepala Seksi PLP dan Air Minum
15	Melaksanakan kegiatan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	- Jumlah infrastruktur persampahan yang terbangun dan ditingkatkan	3 unit	
16	Melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional	- Presentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak	76 %	
17	Melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas daerah kabupaten/kota dan kawasan strategis provinsi	- Panjang drainase yang dibangun/ditingkatkan	3000 meter	
18	Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi/rawa	- Luas jaringan irigasi / rawa yang direhabilitasi	5.142 Ha	Kepala Seksi Pelaksanaan
		- Panjang jalan inspeksi yang direhabilitasi	10.000 meter	
19	Terlaksananya penyusunan pola dan rencana pengelolaan SDA WS kewenangan provinsi	- Jumlah dokumen yang telah tersusun	1 dokumen	

20	Tertindakannya koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemeliharaan akwasan rawa	- Dokumen pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemeliharaan kawasan rawa	1 dokumen	
21	Tertindakannya operasi dan pemeliharaan daerah irigasi / rawa kewenangan provinsi	- Jumlah daerah irigasi rawa (DIR) kewenangan yang dioperasikan dan dipelihara	27 DIR	Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan
22		- Jumlah daerah irigasi (DI) kewenangan yang dioperasikan dan dipelihara	1 DI	
23	Tertindakannya koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan SDA kewenangan provinsi	- Dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan SDA kewenangan Provinsi	5 Laporan	
24	Tertindakannya OP bendung kewenangan provinsi	- Bendung yang dipelihara	1 buah	
25	Tertindakannya OP Prasarana Air Baku dan Situ	- Jumlah prasarana air baku yang dipelihara	3 unit	
26	Tertindakannya pengelolaan hidrologi dan kualitas air WS kewenangan provinsi	- Bangunan pos hidrologi yang dipelihara	35 Pos	
27	Terbangunnya bangunan breakwater	- Bangunan breakwater yang terbangun	113 meter	
28	Terbangunnya bangunan pintu air/bendung pengendali banjir	- Bangunan pintu air/bendung pengendali banjir yang terbangun	7 buah	
29	Tertindakannya penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi pengendali banjir, lahar, drainase utama perkotaan dan pengaman pantai	- Jumlah dokumen yang telah tersusun	3 Dokumen	
30	Melaksanakan peningkatan peran masyarakat dalam penataan ruang	- Jumlah laporan peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat	1 Dokumen	Kepala Seksi pengawasan, pengendalian dan pemanfaatan ruang
31	Melaksanakan sistem informasi penataan ruang	- Jumlah data dan informasi yang dihasilkan dari sstem informasi penataan ruang	1 Dokumen	
32	Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penertiban dan penegakan hukum	- Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penertiban dan penegakan hukum bidang	1 dokumen	

	bidang penataan ruang	penataan ruang		
33	Melaksanakan pelaksanaan persetujuan substansi, evaluasi dan penetapan RTRW provinsi	- Jumlah dokumen pelaksanaan persetujuan substansi, evaluasi dan penetapan RTRW Provinsi	1 Dokumen	Kepala Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang
34	Melaksanakan penetapan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penataan ruang	- Jumlah dokumen kebijakan perda/pergub selain RTRW provinsi	1 Dokumen	
35	Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	- Jumlah dokumen sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	1 dokumen	
36	Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW	- Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW kabupaten/kota	1 Dokumen	
37	Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RTRW dan RTRR kabupaten/kota	- Jumlah dokumen Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RTRW dan RTRR kabupaten/kota	1 Dokumen	
38	Melaksanakan peningkatan peran masyarakat dalam penataan ruang	- Jumlah laporan peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat	1 Dokumen	
39	Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah	- Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah	1 Dokumen	
40	Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemberian insentif dan disinsentif bidang penataan ruang	- Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemberian insentif dan disinsentif bidang penataan ruang	1 Dokumen	
41	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan penataan ruang	- Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan penataan ruang	1 Dokumen	
42	Masyarakat jasa konstruksi	- Jumlah instruktur / asesor / penyelenggaraan pelatihan yang terlatih	30 Orang	Kepala Seksi Pembedayaan
43	Tenaga terampil konstruksi	- Jumlah tenaga terampil yang tersertifikasi secara on site	90 orang	
44	Tenaga ahli konstruksi	- Jumlah tenaga ahli yang tersertifikasi	30 Orang	
45	Operator kabupaten / kota website SIPJAKI	- Jumlah laporan pelatihan dan monitoring sistem informasi Pembina jasa konstruksii (SIPJAKI)	1 Laporan	

46	Masyarakat jasa konstruksi	- Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis	40 orang	
		- Jumlah peserta yang mengikuti sertifikasi	10 Orang	
47	Kabupaten / kota	- Jumlah laporan penyediaan data dan informasi jasa konstruksi	1 Laporan	Kepala Seksi Pengaturan
		- Jumlah laporan penyiapan training need assessment (TNA) pelatihan tenaga ahli konstruksi	1 Laporan	
		- Jumlah laporan hasil koordinasi dan pembinaan jasa konstruksi	1 Laporan	
		- Jumlah laporan pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi pada APBD Provinsi	1 Laporan	
48	Masyarakat Jasa Konstruksi	- Jumlah peserta yang mengikuti forum jasa konstruksi di daerah	40 orang	
		- Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	60 Orang	
49	Pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi	- Jumlah dokumen penguatan penyelenggaraan UPT laboratorium bahan konstruksi	1 Dokumen	Kepala Sub bagian tata usaha
50	Penyediaan perangkat pendukung layanan informasi jasa konstruksi	- Jumlah pengadaan dan pemeliharaan kalibrasi peralatan laboratorium bahan konstruksi	2 alat uji	
51	Penyediaan perangkat pendukung layanan informasi jasa konstruksi	- Jumlah dokumen penyiapan akreditasi laboratorium bahan konstruksi	1 dokumen	

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan merupakan suatu komponen yang terdiri dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun untuk memenuhi salah satu komponen dari akuntabilitas kinerja dan penyusunan berdasarkan perencanaan kinerja yang telah ditetapkan. Penyusunan LAKIP berdasarkan kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 18 tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran, dengan membandingkan antara rencana kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai. Metode seperti ini bermanfaat dalam upaya memberikan gambaran kepada pihak lain tentang pelaksanaan upaya organisasi dalam rangka mewujudkan tujuandan sasaran. Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi 7 (tujuh) kategori sebagai berikut :

## KATEGORI CAPAIAN KINERJA

PREDIKAT	KATEGORI CAPAIAN
AA (Nilai > 90 -100)	Sangat memuaskan
A (Nilai > 80 - 90)	Memuaskan
BB (Nilai > 70 - 80)	Sangat Baik
B (Nilai > 60 - 70)	Baik
CC (Nilai > 50 - 60)	Cukup memadai
C (Nilai > 30 - 50)	Kurang
D (Nilai > 0 - 30)	Sangat Kurang

## III.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2022 adalah B (Baik) dengan nilai 63,85 %, sebagai berikut :

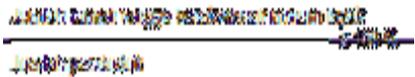
Tabel III.1 Capaian Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGE T	REALI - SASI	PERSE N-TASE
1	Meningkatnya Konektivitas antar daerah	- Persentase jalan dalam kondisi mantap (%)	85,32 %	84,51	99,05
2	Meningkatkan kondisi kemandapan jalan provinsi dan kab/kota.	- Proporsi panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi baik	0,42	0,41	97,62
3	Meningkatkan aksesibilitas menuju simpul transportasi, fasilitas-fasilitas pelayanan dasar publik dan pusat-pusat perekonomian daerah.	- Persentase jalan provinsi dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )	41,53	41,33	99,51
4	Persentase akses air minum layak	- Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak (%)	90,56 %	77,01	85,04
5	Infrastruktur Persampahan yang dibangun /ditingkatkan	- Jumlah Infrastruktur Persampahan yang terbangun dan ditingkatkan (unit)	2 unit	1,00	50,00
6	Persentase akses sanitasi layak	- Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses sanitasi Layak (%)	72 %	86,91	100,00
7	Panjang drainase yang dibangun/ditingkatkan	- Panjang Drainase yang dibangun / ditingkatkan (meter)	2000 meter	1194	59,70

8	Pengembangan Kawasan pada Daerah Strategis Provinsi yang terbangun dan terselenggara infrastrukturnya	- Jumlah penyelenggaraan infrastruktur permukiman di Kawasan Strategis Provinsi (kawasan)	3 kawasan	5,00	166,67
9	Bangunan gedung Strategis Provinsi yang dibangun dan ditingkatkan	- Jumlah Bangunan Gedung Strategis Provinsi yang dibangun dan ditingkatkan (unit)	7 unit	4,00	57,14
10	Bangunan dan lingkungan di Kawasan Strategis Provinsi yang tertata dengan baik	- Jumlah Bangunan beserta Lingkungannya yang terbangun dan dikelola dengan baik (unit)	6 unit	4,00	66,67
11	Meningkatnya fungsi tata ruang wilayah melalui perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	- Jumlah RTR Provinsi/Kab/Kota di Kalimantan Tengah (Perda/Perkada)	6 Perda/Perkada	6	100,00
		- Jumlah Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah (Kabupaten/kota)	14 Kabupaten/kota	14,00	100,00
		- Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (Persentase)	50 %	50	100,00
		- Jumlah Peta Analog dan Digital tentang Rencana Tata Ruang dan Tematik (Informasi)	60 Informasi	60	100,00
12	Meningkatnya pengelolaan Irigasi dan konservasi SDA yang berkelanjutan	- Rasio Jaringan Irigasi (%)	23,85 %	24	100,00
		- Persentase Irigasi Kewenangan Provinsi dalam kondisi baik (%)	77,45 %	77,45	100,00
13	Terlaksananya pelatihan bagi masyarakat jasa konstruksi	- Jumlah Masyarakat Jasa Konstruksi yang Terlatih (orang)	830 orang	910	109,64

### Rumus perhitungan Indikator Utama :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	meningkatnya jalan dalam kondisi mantap	Persentase jalan dalam kondisi mantap (%)	$\frac{\text{Panjang jalan provinsi kondisi baik (Km)}}{\text{Panjang jalan provinsi seluruhnya (Km)}}$	- Survey - Data diolah di Dinas PUPR
2	meningkatnya panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi baik	Proporsi panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap (Km)}}{\text{Panjang jalan provinsi seluruhnya (Km)}} \times 100\%$	- Survey - Data diolah di Dinas PUPR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
3	meningkatnya jalan provinsi dalam kondisi baik	Persentase jalan provinsi dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )	$\frac{\text{Panjang jalan provinsi dalam kondisi baik (Km)}}{\text{Panjang jalan provinsi seluruhnya (Km)}} \times 100 \%$	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Survey</li> <li>- Data diolah di Dinas PUPR</li> </ul>
4	Persentase akses air minum layak	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak (%)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data BPS</li> <li>- Survey</li> <li>- Data diolah di Dinas PUPR</li> </ul>
5	Infrastruktur Persampahan yang dibangun/ditingkatkan	Jumlah Infrastruktur Persampahan yang terbangun dan ditingkatkan (unit)	Jumlah Infrastruktur Persampahan yang terbangun dan ditingkatkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data BPS</li> <li>- Survey</li> <li>- Data diolah di Dinas PUPR</li> </ul>
6	Persentase akses sanitasi layak	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses sanitasi Layak (%)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data BPS</li> <li>- Survey</li> <li>- Data diolah di Dinas PUPR</li> </ul>
7	Panjang drainase yang dibangun/ditingkatkan	Panjang Drainase yang dibangun / ditingkatkan (meter)	Jumlah Panjang Drainase yang dibangun dan ditingkatkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Survey</li> <li>- Data diolah di Dinas PUPR</li> </ul>
8	Pengembangan Kawasan pada Daerah Strategis Provinsi yang terbangun dan terselenggara infrastrukturnya	Jumlah penyelenggaraan infrastruktur permukiman di Kawasan Strategis Provinsi (kawasan)	Jumlah penyelenggaraan infrastruktur permukiman di Kawasan Strategis Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Survey</li> <li>- Data diolah di Dinas PUPR</li> </ul>
9	Bangunan gedung Strategis Provinsi yang dibangun dan ditingkatkan	Jumlah Bangunan Gedung Strategis Provinsi yang dibangun dan ditingkatkan (unit)	Jumlah Bangunan Gedung Strategis Provinsi yang dibangun dan ditingkatkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Survey</li> <li>- Data diolah di Dinas PUPR</li> </ul>
10	Bangunan dan lingkungan di Kawasan Strategis Provinsi yang tertata dengan baik	Jumlah Bangunan beserta Lingkungannya yang terbangun dan terkelola dengan baik (unit)	Jumlah Bangunan beserta Lingkungannya yang terbangun dan terkelola dengan baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Survey</li> <li>- Data diolah di Dinas PUPR</li> </ul>
11	Meningkatnya fungsi tata ruang wilayah melalui perencanaan, pemanfaatan	Jumlah RTR Provinsi/Kab/Kota di Kalimantan Tengah (Perda/Perkada)	Jumlah RTR Provinsi/Kab/Kota di Kalimantan Tengah yang disahkan (Perda/Perkada)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Survey</li> <li>- Data diolah di Dinas PUPR</li> </ul>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	dan pengendalian tata ruang			
12		Jumlah Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah (Kabupaten/kota)	Jumlah Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah (Kabupaten/kota)	- Survey - Data diolah di Dinas PUPR
13		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (Persentase)	$\frac{\text{Luas pemanfaatan ruang A yang sesuai peruntukannya}}{\text{Luas rencana peruntukan ruang A}} \times 100$ (Persentase)	- Survey - Data diolah di Dinas PUPR
14		Jumlah Peta Analog dan Digital tentang Rencana Tata Ruang dan Tematik (Informasi)	Jumlah Peta Analog dan Digital tentang Rencana Tata Ruang dan Tematik (Informasi)	- Survey - Data diolah di Dinas PUPR
15	Meningkatnya pengelolaan jaringan irigasi dan konservasi Sumber Daya Air yang berkelanjutan	Rasio Jaringan Irigasi (%)	$\frac{\text{Panjang jaringan fungsional (m)}}{\text{Luas jaringan kewenangan provins (ha)}} \times 100 \%$	- Survey - Data diolah di Dinas PUPR
16		Persentase Irigasi Kewenangan Provinsi dalam kondisi baik (%)	$\frac{\text{Luas jaringan kondisi baik (Ha)}}{\text{Luas jaringan kewenangan provinsi (Ha)}} \times 100 \%$	- Survey - Data diolah di Dinas PUPR
17	Terlaksananya pelatihan bagi masyarakat jasa konstruksi	Jumlah Masyarakat Jasa Konstruksi yang Terlatih (orang)	Jumlah orang yang terlatih (orang)	- Survey - Data diolah di Dinas PUPR

### III.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah yang dicerminkan dalam capaian indikator kinerja, adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

## 1. BIDANG BINA MARGA

### III.2.1 Sasaran Meningkatnya Konektivitas antar daerah

Capaian sasaran meningkatnya kualitas jalan provinsi mempunyai indikator Persentase tingkat kondisi jalan provinsi baik dan sedang dapat dilihat pada Tabel III.2.1 berikut:

**Tabel III.2.1. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan Provinsi**

No	Indikator	2022	2023		Capaian 2023 (%)
		Realisasi (%)	Target	Realisasi (%)	
1.	Persentase jalan dalam kondisi mantap (%)	84,51	85,61	85,60	99,99
2.	Proporsi panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi baik	0,41	0,43	0,43	99,77

Pada tabel di atas dalam dilihat bahwa realisasi Tahun 2023 lebih baik dari tahun 2022, namun belum mencapai 100% dikarenakan adanya perubahan anggaran seiring berjalannya waktu pekerjaan.

Panjang Jalan Provinsi Provinsi Kalimantan Tengah dalam kondisi mantap yang merupakan gabungan dari jumlah panjang jalan baik (838,031 km) dengan jumlah panjang jalan sedang adalah sebesar (186,420 km). Persentase tingkat kondisi jalan provinsi baik dan sedang didapat dari hasil perbandingan total jalan kondisi mantap berbanding total Jalan Provinsi adalah 1.024,451 km/1.272,08 km sehingga didapat persentase perbandingan tersebut sebesar 80,53 %.

Status Jalan Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan type permukaan (km) dan kondisi (km) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.2.1.a. Status Jalan Provinsi Berdasarkan Type Permukaan dalam Kilometer

Jalan Provinsi berdasarkan Type Permukaan (km)		
Aspal/ Penetrasi	Agregat	Tanah
1.059,18 Km	107,03 Km	95,07 Km

Tabel III.2.1.b. Status Jalan Provinsi Berdasarkan Kondisi dalam Kilometer

Jalan Provinsi berdasarkan Kondisi (km)					
MANTAP			TIDAK MANTAP		
Baik	Sedang	TOTAL	Rusak Ringan	Rusak Berat	TOTAL
838,031 km	186,420 km	1.024,451 km	170,36 km	77,270 km	247,630 km

### III.2.2 Sasaran Meningkatkan aksesibilitas menuju simpul transportasi, fasilitas-fasilitas pelayanan dasar publik dan pusat-pusat perekonomian daerah.

Capaian sasaran tersedianya konektivitas wilayah provinsi mempunyai indikator Persentase terhubungnya pusat - pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) di wilayah provinsi dapat dilihat pada Tabel III.2.2.a berikut:

Tabel III.2.2.a. Target dan Realisasi Kinerja Tersedianya Konektivitas Wilayah Provinsi

No	Indikator	2022	2023		Capaian 2023 (%)
		Realisasi (%)	Target	Realisasi (%)	
3.	Persentase jalan provinsi dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )	41,33	43,23	45,13	99,79

Pada tabel di atas dalam dilihat bahwa realisasi Tahun 2023 lebih baik dari tahun 2022, namun belum mencapai 100% dikarenakan adanya perubahan anggaran seiring berjalannya waktu pekerjaan.

Tolak ukur capaian sasaran Tersedianya konektivits wilayah provinsi terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu indikator Persentase terhubungnya pusat-

pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) di wilayah provinsi. Besarnya nilai indikator dihitung berdasarkan perbandingan antara panjang jalan nasional dan panjang jalan provinsi yang tersedia dengan kebutuhan panjang jalan untuk menghubungkan pusat-pusat produksi dalam satuan persen.

Provinsi Kalimantan Tengah merupakan penghasil tambang dan perkebunan, antara lain batubara, bijih besi, sawit dan karet. Guna mendukung, menunjang dan memfasilitasi transportasi hasil tambang dan perkebunan tersebut Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah mengutamakan membangun infrastruktur jalan. Kondisi infrastruktur jalan di Provinsi Kalimantan Tengah saat ini sebagian besar sudah terkoneksi antar kabupaten maupun antar provinsi. Hal ini terlihat dari kondisi jalan yang menghubungkan antara Provinsi Kalimantan Tengah dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Barat. Untuk ke Provinsi Kalimantan Timur sudah terhubung walaupun sebagian ruas masih terdapat jalan tanah.

Dengan adanya peningkatan dari pembangunan jalan dan jembatan dapat diinformasikan bahwa:

- Peningkatan Jalan Sukamara - Lunci (MYC)
- Peningkatan Jalan Lunci - Jelai (MYC)
- Peningkatan Jalan Riam Durian - Sukamara (MYC)
- Peningkatan Jalan Bangkal - Telaga Pulang - Kuala Pembuang I (MYC)
- Peningkatan Jalan Bangkal - Telaga Pulang - Kuala Pembuang II (MYC)
- Peningkatan Jalan Sp.Bangkal - Bangkal (MYC)
- Peningkatan Jalan Ujung Pandaran - Kuala Pembuang (MYC)
- Peningkatan Jalan Rantau Pulut - Tb.Manjul (MYC)
- Peningkatan Jalan Bawan - Kuala Kurun I (MYC)
- Peningkatan Jalan Bawan - Kuala Kurun II (MYC)
- Peningkatan Jalan Kuala Kurun - Linau - Tumbang Jutuh (MYC)
- Peningkatan Jalan Simpang Pundu - Tumbang Samba (MYC)
- Peningkatan Jalan Bukit Liti - Bawan (MYC)
- Peningkatan Jalan Pulang Pisau - Pangkoh (MYC)
- Peningkatan Jalan Pangkoh - Bahaur I (MYC)

- Peningkatan Jalan Pangkoh - Bahaur II (MYC)
- Peningkatan Jalan Pelantaran - Parenggean I (MYC)
- Peningkatan Jalan Pelantaran - Parenggean II (MYC)
- Peningkatan Jalan Parenggean - Tb.Sangai (MYC)
- Peningkatan Jalan Tumbang Sangai - Tb.Kalang I (MYC)
- Peningkatan Jalan Tumbang Sangai - Tb.Kalang II (MYC)
- Peningkatan Jalan Sampit - Samuda (MYC)
- Peningkatan Jalan Samuda - Ujung Pandaran (MYC)
- Peningkatan Jalan Kuala Kuayan - Tanjung Jariangau (MYC)
- Peningkatan Jalan Sp. Patas - Tabak Kanilan (MYC)
- Peningkatan Jalan Tabak Kanilan - Rikut Jawu (MYC)
- Peningkatan Jalan Telang Siong - Bangkuang I (MYC)
- Peningkatan Jalan Telang Siong - Bangkuang II (MYC)
- Peningkatan Jalan Lingkar Kota Muara Teweh (MYC)
- Peningkatan Jalan Dadahup/ G1 - Lamunti (MYC)
- Peningkatan Jalan Pangkalan Bun - Kotawaringin Lama (MYC)
- Peningkatan Jalan Yos Sudarso dan Jalan Sudirman Puruk Cahu (MYC)
- Peningkatan Jalan Pangkalan Bun - Kotawaringin Lama
- Peningkatan Jalan Bukit Tunggal Sukamulya Menuju Tempat Wisata Bukit Cinta (Tangkiling)
- Peningkatan Jalan Palantaran - Parenggean
- Peningkatan Jalan Pulang Pisau - Pangkoh (DAK)
- Pembangunan Akses Jalan Menuju RSUD Type B Wilayah Barat
- Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi Wilayah Barito Utara dan Murung Raya
- Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi Wilayah Kobar, Lamandau, Palangka Raya dan Sukamara
- Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi Wilayah Katingan, Kotim dan Seruyan
- Pemeliharaan Berkala Jalan Di Provinsi Kalimantan Tengah Wilayah Tengah (MYC)
- Pemeliharaan Berkala Jalan Di Provinsi Kalimantan Tengah Wilayah Timur (MYC)
- Pemeliharaan Berkala Jalan Di Provinsi Kalimantan Tengah Wilayah Barat (MYC)
- Pemeliharaan Berkala Jembatan Tersebar Di Provinsi Kalimantan Tengah

- Pemeliharaan Rutin Jembatan Tersebar
- Pembangunan Jembatan Sei Manjul (Lanjutan)
- Penggantian Jembatan di Provinsi Kalimantan Tengah (MYC)
- Pembangunan Jembatan di Provinsi Kalimantan Tengah (MYC)

Merupakan Ruas-ruas Jalan Provinsi di Provinsi Kalimantan Tengah.

**Tabel III.2.2.b. Panjang Jalan Provinsi per Wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah dalam Kilometer**

Wilayah Barat	Panjang = 565.37 Km	5 Kab.	Kobar, Lamandau, Sukamara, Seruyan, Kotim
Wilayah Tengah	Panjang = 490.01 Km	5 Kab.	Katingan, Kapuas, Gunung Mas, Palangka Raya, Pulang Pisau
Wilayah Timur	Panjang = 125.70 Km	4 Kab.	Barsel, Bartim, Barut, Murung Raya
Total	Panjang = 1272.08 Km		14 Kabupaten/Kota

## 2. BIDANG CIPTA KARYA

### III.2.3 Sasaran Persentase akses air minum layak

Perencanaan pembangunan daerah pada Bidang Cipta Karya diarahkan untuk mendukung visi misi Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Pengelolaan infrastruktur keciptakarya dan mewujudkan amanat yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 - 2026 (Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021), mengamanatkan beberapa hal terkait dengan pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) PUPR (PP No. 2 Th. 2018), antara lain adalah Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota.

Dalam hal pemenuhan SPM tersebut dan dikarenakan Provinsi Kalimantan Tengah belum memiliki SPAM skala regional dan skala lintas Kabupaten/Kota, maka Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah hanya melakukan pembinaan dan mendukung kegiatan di Kabupaten/Kota melalui Program/Kegiatan yang dihibahkan. Pada tahun 2023 melalui

Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah, capaian sasaran meningkatnya kinerja pengelolaan air minum mempunyai indikator Persentase akses air minum layak dapat dilihat pada Tabel III.2.3.a berikut:

**Tabel III.2.3.a Target dan Realisasi Kinerja Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Air Minum Layak Provinsi Kalimantan Tengah**

No	Indikator	2022	2023		Capaian 2023 (%)
		Realisasi (%)	Target	Realisasi (%)	
4.	Persentase akses air minum layak (%)	77,01	95,28	77,72	81,57

Pada tabel di atas dalam dilihat bahwa realisasi Tahun 2023 tidak ada kenaikan realisasi seperti tahun 2022, dikarenakan adanya perubahan anggaran seiring berjalannya waktu pekerjaan.

Melalui kegiatan pembangunan sistem penyediaan air minum yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk capaian pelayanan air minum Provinsi Kalimantan Tengah, persentase rumah tangga pengguna air minum bersih dan akses air minum layak di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel III.2.3.b dan Tabel III.2.3.c berikut ini.

Tabel III.2.3.b. Persentase rumah tangga menurut Kabupaten/Kota dan sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk minum di Provinsi Kalimantan Tengah, 2023.

Kabupaten/ Kota	Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Minum						Jumlah
	Air Kemasan Bermerk, Air Isi Ulang	Leding	Sumur Bor/ Pompa	Sumur Terlindung, Sumur Tak Terlindung	Mata Air Terlindung, Mata Air Tak Terlindung	Air Permukaan, Air Hujan, Lainnya	
Kotawaringin Barat	65,40	1,50	11,26	21,15	NA	0,54	100,00
Kotawaringin Timur	50,24	2,11	14,71	9,69	2,05	21,19	100,00
Kapuas	44,01	9,91	16,66	NA	NA	27,99	100,00
Barito Selatan	38,57	22,17	1,87	11,27	4,08	22,03	100,00
Barito Utara	51,27	15,41	2,04	8,22	12,67	10,39	100,00
Sukamara	50,44	NA	28,23	14,10	3,21	3,72	100,00
Lamandau	47,60	4,04	12,04	22,36	6,41	7,55	100,00
Seruyan	45,69	-	14,94	23,73	7,11	8,53	100,00
Katingan	42,133	1,78	28,94	7,95	5,73	13,46	100,00
Pulang Pisau	46,45	2,87	10,45	-	NA	40,16	100,00
Gunung Mas	37,97	7,37	17,63	0,87	6,19	29,97	100,00
Barito Timur	36,35	4,23	9,45	41,90	2,19	5,87	100,00
Murung Raya	15,77	16,82	6,47	7,73	27,21	26,00	100,00
Palangka Raya	79,91	1,71	18,02	-	-	NA	100,00
<b>Kalimantan Tengah</b>	<b>50,07</b>	<b>5,62</b>	<b>14,15</b>	<b>10,62</b>	<b>3,97</b>	<b>15,57</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah, 2023

**Tabel III.2.3.c. Persentase rumah tangga menurut Kabupaten/Kota, sumber air minum bersih dan akses air minum layak di Provinsi Kalimantan Tengah, 2023.**

Kabupaten/Kota	Sumber Air Minum	
	Bersih	Akses Air Minum Layak
Kotawaringin Barat	86,48	93,69
Kotawaringin Timur	73,89	81,13
Kapuas	63,50	63,72
Barito Selatan	65,88	59,30
Barito Utara	80,70	77,54
Sukamara	76,95	86,56
Lamandau	75,21	78,88
Seruyan	69,06	67,26
Katingan	65,48	85,85
Pulang Pisau	55,08	85,08
Gunung Mas	56,47	61,20
Barito Timur	66,22	67,51
Murung Raya	50,44	58,83
Palangka Raya	91,28	98,69
<b>Kalimantan Tengah</b>	<b>71,94</b>	<b>77,72</b>

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah, 2023

Kinerja pengelolaan air minum layak di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023 tidak mencapai 100% dan terhadap pencapaian kinerja penyediaan air minum layak tahun 2022 (77,01%) mengalami peningkatan penurunan persentase di 2023 (77,72%), cukup ada peningkatan terhadap pelayanan penyediaan air minum layak kepada masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah. Capaian pelayanan akses air minum layak Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2019-2023 pada Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Tabel III.2.5.d berikut ini.

**Tabel III.2.3.d. Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan air minum layak menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, 2019-2023**

Rincian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	73,27%	74,91%	77,05%	77,01%	77,72%

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah, 2023

### III.2.4 Sasaran Infrastruktur Persampahan yang dibangun/ditingkatkan

**Tabel III.2.4.a Target dan Realisasi Kinerja Pembangunan Infrastruktur Persampahan di Provinsi Kalimantan Tengah**

No	Indikator	2022	2023		Capaian 2023 (%)
		Realisasi (unit)	Target	Realisasi (unit)	
5.	Infrastruktur Persampahan yang dibangun /ditingkatkan (unit)	1	3	1	33,33

Pada tabel di atas dalam dilihat bahwa realisasi Tahun 2023 tidak ada kenaikan realisasi seperti tahun 2022, dikarenakan adanya perubahan anggaran seiring berjalannya waktu pekerjaan

### III.2.5 Sasaran Persentase akses sanitasi layak

Perencanaan pembangunan daerah pada Bidang Cipta Karya diarahkan untuk mendukung visi misi Gubernur Prov. Kalimantan Tengah. yaitu pemenuhan SPM PUPR. Disamping air minum, pemenuhan SPM lainnya menurut PP No. 2 Tahun 2018 adalah Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota.

Dikarenakan Provinsi Kalimantan Tengah belum memiliki SPAL skala regional dan skala lintas Kabupaten/Kota, maka Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah hanya melakukan pembinaan dan mendukung kegiatan di Kabupaten/Kota melalui Program/Kegiatan yang dihibahkan. Pada tahun 2023 melalui Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah, capaian sasaran meningkatnya kinerja pengelolaan sanitasi (limbah) mempunyai indikator Persentase akses sanitasi (limbah) layak dapat

dilihat pada Tabel III.2.5.a berikut:

**Tabel III.2.5.a Target dan Realisasi Kinerja Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sanitasi Layak Provinsi Kalimantan Tengah**

No	Indikator	2022	2023		Capaian 2023 (%)
		Realisasi (%)	Target	Realisasi (%)	
6.	Persentase akses sanitasi layak (%)	86,91	76	86,91	114,36

Pada tabel di atas dalam dilihat bahwa realisasi Tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2022, bahkan pencapaian hingga 114,36%. Pencapaian kinerja sanitasi (limbah) layak di Provinsi Kalimantan Tengah pada akhir tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 86,91%. Hal ini meningkat cukup signifikan dibandingkan pencapaian di tahun 2022 yang hanya 74,33%. Peningkatan persentase ini dikarenakan jumlah masyarakat di Kalimantan Tengah dalam hal penggunaan fasilitas tempat pembuangan air besar tangki septic tank dan rata-rata menggunakan kloset jenis leher angsa, dapat dilihat pada Tabel III.2.5.b dan Tabel III.2.5.c berikut ini.

**Tabel III.2.5.b Persentase rumah tangga menurut Kabupaten/Kota dan tempat pembuangan akhir tinja di Provinsi Kalimantan Tengah, 2023**

Kabupaten/Kota	Tempat Pembuangan Akhir Tinja					Jumlah
	Tangki	IPAL	Kolam/Sawah/Sungai/Danau/Laut	Lubang Pantai	Pantai/Tanah Lapang/Kebun, Lainnya	
Kotawaringin Barat	90,12	-	0,60	9,27	-	100,00
Kotawaringin Timur	81,35	-	12,65	5,71	0,28	100,00
Kapuas	64,14	2,62	29,92	3,13	0,19	100,00
Barito Selatan	73,93	0,09	17,70	7,37	0,90	100,00
Barito Utara	53,01	-	5,89	40,88	0,23	100,00
Sukamara	71,23	0,69	10,42	17,67	-	100,00
Lamandau	74,37	2,54	3,97	19,12	-	100,00
Seruyan	71,12	-	4,28	24,37	0,23	100,00
Katingan	42,25	0,20	7,38	49,51	0,65	100,00
Pulang Pisau	68,62	0,71	22,95	7,14	0,58	100,00
Gunung Mas	62,95	0,29	1,33	35,43	-	100,00
Barito Timur	94,31	1,22	4,32	0,15	-	100,00
Murung Raya	28,05	0,49	11,65	59,30	0,51	100,00
Palangka Raya	95,49	-	1,20	2,92	0,39	100,00
<b>Kalimantan Tengah</b>	<b>73,43</b>	<b>0,62</b>	<b>10,60</b>	<b>15,08</b>	<b>0,27</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah, 2023

**Tabel III.2.5.c Persentase rumah tangga menurut Kabupaten/Kota dan jenis kloset yang digunakan rumah tangga di Provinsi Kalimantan Tengah, 2023**

Kabupaten/Kota	Jenis Kloset yang Digunakan Rumah Tangga			Jumlah
	Leher Angsa	Plengsengan	Cemplung/Cubluk	
Kotawaringin Barat	97,94	1,87	0,19	100,00
Kotawaringin Timur	78,20	2,52	19,28	100,00
Kapuas	70,12	2,09	27,78	100,00
Barito Selatan	82,67	4,58	12,75	100,00
Barito Utara	97,46	0,18	2,36	100,00
Sukamara	91,86	3,82	4,31	100,00
Lamandau	92,24	3,28	4,48	100,00
Seruyan	91,36	2,71	5,93	100,00

Katingan	90,65	1,01	8,34	100,00
Pulang Pisau	75,82	1,86	22,31	100,00
Gunung Mas	97,28	2,04	0,67	100,00
Barito Timur	96,42	-	3,58	100,00
Murung Raya	89,46	0,78	9,76	100,00
Palangka Raya	98,49	0,31	1,20	100,00
<b>Kalimantan Tengah</b>	<b>87,30</b>	<b>1,86</b>	<b>10,85</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah, 2023

Capaian pelayanan sanitasi (limbah) layak Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2019-2023 pada Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Tabel III.2.5.d berikut ini.

**Tabel III.2.5.d Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, 2019-2023**

Rincian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Persentase rumah tangga dengan TPAT Tangki Septic (sanitasi layak)	69,23%	72,31%	73,77%	74,33%	86,91%

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah, 2023

### III.2.6 Sasaran Panjang Drainase yang Dibangun/ditingkatkan

Pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk yang cepat di Perkotaan menimbulkan tekanan terhadap ruang dan lingkungan untuk kebutuhan perumahan, kawasan industri/jasa dan fasilitas pendukungnya, yang selanjutnya mengubah lahan terbuka dan/atau lahan basah menjadi lahan terbangun. Perkembangan kawasan terbangun yang sangat pesat sering tidak terkendali dan tidak sesuai lagi dengan tata ruang maupun konsep pembangunan yang berkelanjutan, mengakibatkan banyak kawasan-kawasan rendah yang semula berfungsi sebagai tempat penampungan air sementara (*retarding pond*) dan bantaran sungai berubah menjadi tempat hunian penduduk.

Hal tersebut diatas membawa dampak pada rendahnya kemampuan drainase perkotaan dan kapasitas sarana serta prasarana pengendali banjir/genangan (saluran primer dan sekunder, kolam tampungan, dan pintu pengatur) untuk mengeringkan kawasan terbangun dan mengalirkan air ke pembuangan akhirnya yaitu ke laut.

*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah*

Dampak terburuk dari kondisi lingkungan fisik tersebut adalah terjadinya genangan pada saat musim penghujan.

Pada umumnya Kawasan Perkotaan di Provinsi Kalimantan Tengah setiap tahun selalu dilanda genangan pada wilayah tertentu khususnya pada wilayah strategis seperti kawasan pendidikan, perkantoran dan kawasan permukiman termasuk pada infrastruktur jalan pada musim penghujan, akibat tidak berfungsinya sistem drainase sehingga mengganggu dan/atau merugikan aktivitas masyarakat. Hal ini dikarenakan intensitas curah hujan yang tinggi, sehingga saluran yang tersedia tidak bisa menampung debit air hujan dan mengalirkannya menuju saluran drainase yang lebih besar (sekunder-primer). Beberapa hal yang menjadi penyebab genangan air hujan ini diantaranya karena sedimentasi pada saluran yang membuat elevasi dasar saluran berubah, sampah yang menumpuk di dalam saluran drainase mengakibatkan penyumbatan, terutama pada bangunan-bangunan yang membuat jalan masuk terbuat dari beton yang tidak memiliki lubang kontrol untuk pembersihan saluran di bawahnya, kondisi saluran yang sudah berumur, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap aturan pendirian bangunan.

Menurut pemantauan Beberapa Petugas Lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah yang terjun langsung di lapangan saat terjadi genangan tersebut, beberapa saluran memang harus dilakukan normalisasi saluran, bahkan di beberapa tempat perlu menambah lebar dan kedalaman saluran untuk menyesuaikan elevasi agar air dapat dialirkan secepatnya sehingga tidak menimbulkan genangan.

Capaian sasaran meningkatnya kualitas dan fungsi saluran drainase perkotaan mempunyai indikator Persentase saluran drainase/ gorong-gorong dalam kondisi baik dapat dilihat pada Tabel III.2.6.a berikut :

**Tabel III.2.6.a Target dan Realisasi Kinerja Meningkatnya Kualitas dan Fungsi Saluran drainase**

No	Indikator	2022	2023		Capaian 2023 (%)
		Realisasi (M)	Target	Realisasi (%)	
7.	Panjang drainase yang dibangun/ditingkatkan (meter)	1.194,04	3000 M	2.287,33	76,24

Pembangunan/peningkatan saluran drainase dengan target 3.000 m (100%) pada tahun 2023, namun untuk pencapaian kinerja pada akhir tahun 2023 hanya sepanjang 2287,03 m (76,24%) kurang dari target yang telah direncanakan. Dengan Indikator sasarannya adalah Jumlah panjang pembangunan/peningkatan saluran drainase/gorong-gorong (khususnya pada drainase perkotaan). Hal ini masih belum dapat mengantisipasi isu strategis Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal pencegahan banjir dan pengurangan genangan pada lingkup drainase perkotaan. Peningkatan jumlah penduduk yang cukup besar sehingga meningkatkan jumlah permukiman di Perkotaan (kawasan padat penduduk), merupakan salah satu faktor tidak tertanganinya masalah banjir perkotaan.

### III.2.7 Sasaran Pengembangan Kawasan pada Daerah Strategis Provinsi yang terbangun dan terselenggara infrastrukturnya

Capaian Meningkatnya Pengembangan Kawasan pada Daerah Strategis Provinsi yang terbangun dan terselenggara infrastrukturnya dapat dilihat pada Tabel III.2.7.a berikut:

**Tabel III.2.7.a Target dan Realisasi Kinerja penyelenggaraan infrastruktur dipermukiman di Kawasan Strategis Provinsi Kalimantan Tengah.**

No	Indikator	2022	2023		Capaian 2023 (%)
		Realisasi (kawasan)	Target	Realisasi (Kawasan)	
8.	Jumlah penyelenggaraan infrastruktur permukiman di Kawasan Strategis Provinsi (kawasan)	5	4 Kawasan	5 Kawasan	125

Berdasarkan Tabel III.2.7.a di atas bahwa penyelenggaraan infrastruktur permukiman di Kawasan Strategis Provinsi sudah mencapai target yang direncanakan, yaitu berjumlah 4 kawasan terhadap target berjumlah 5 kawasan. Penyelenggaraan infrastruktur permukiman di Kawasan strategis Provinsi pada tahun anggaran 2023 lebih mengutamakan kepada pembangunan Kawasan yang menjadi IKON/Symbol daerah. Hal ini memberikan dampak positif terhadap perkembangan dan pertumbuhan daerah, menciptakan lapangan kerja,

meningkatkan obyek wisata, penataan Kawasan ruang terbuka hijau (RTH) dan penataan pinggiran sungai serta penataan Kawasan yang menjadi pintu gerbang Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Kota Palangka Raya.

### III.2.8 Sasaran Bangunan gedung Strategis Provinsi yang dibangun dan ditingkatkan

Pencapaian kinerja dalam pembangunan dan peningkatan Gedung Strategis di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada Tabel III.2.8.a berikut:

**Tabel III.2.8.a Target dan Realisasi Kinerja Pembangunan dan Peningkatan Gedung Strategis Provinsi Kalimantan Tengah**

No	Indikator	2022	2023		Capaian 2023 (%)
		Realisasi (Unit)	Target	Realisasi (Unit)	
9.	Jumlah Bangunan Gedung Strategis Provinsi yang dibangun dan ditingkatkan	4 Unit	8 Unit	6 Unit	75

Berdasarkan Tabel III.2.8.a di atas bahwa persentase jumlah bangunan Gedung Strategis Provinsi yang dibangun dan ditingkatkan tidak mencapai target yang direncanakan, yakni dari target yang direncanakan adalah berjumlah 8 unit Gedung dan di di akhir tahun 2023 hanya berjumlah 6 gedung (75%). Hal ini dikarenakan terbatasnya anggaran dan anggaran di utamakan kepada kegiatan/pekerjaan yang lebih prioritas. Disamping itu tidak banyak bangunan gedung Pemerintah yang dibangun, mengingat Sebagian besar kebutuhan akan ketersediaan bangunan Gedung strategis sudah terpenuhi dan rata-rata hanya diperlukan pemeliharaan dan renovasi saja.

### III.2.9 Sasaran Bangunan dan lingkungan di Kawasan Strategis Provinsi yang tertata dengan baik

Penataan bangunan dan lingkungan adalah serangkaian kegiatan yang diperlukan sebagai bagian dari upaya pengendalian pemanfaatan ruang, terutama untuk mewujudkan lingkungan yang baik, khususnya wujud fisik bangunan Gedung dan lingkungannya sebagai wujud dari salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah

melaksanakan penataan dan pengelolaan bangunan dan lingkungan di tengah-tengah Kawasan strategis daerah Provinsi.

Capaian kinerja dalam pengelolaan dan penataan bangunan dan lingkungannya dapat dilihat pada Tabel III.2.9.a berikut:

**Tabel III.2.9.a Target dan Realisasi capaian Kinerja pembangunan bangunan dan lingkungannya pada Kawasan Strategis di Provinsi Kalimantan Tengah**

No	Indikator	2022	2023		Capaian 2023 (%)
		Realisasi (Unit)	Target	Realisasi (Unit)	
10.	Jumlah Bangunan beserta Lingkungannya yang terbangun dan terkelola dengan baik (unit)	4 Unit	7 Unit	9 Unit	128,57

Berdasarkan Tabel III.2.9.a di atas bahwa persentase Jumlah Bangunan beserta Lingkungannya yang terbangun dan terkelola dengan baik di Provinsi Kalimantan Tengah mencapai target yang direncanakan, yakni dari target yang direncanakan adalah berjumlah 7 Unit, di tahun 2023 ini pencapaiannya berjumlah 9 unit (128,57%). hal ini dikarenakan dikarenakan terbatasnya anggaran dan anggaran di utamakan kepada kegiatan/pekerjaan yang lebih prioritas. Disamping itu tidak banyak bangunan beserta lingkungannya yang dikelola dan di tata dengan baik.

### 3. BIDANG TATA RUANG

#### III.2.10 Sasaran Meningkatnya fungsi tata ruang wilayah melalui perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang

Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya ketersediaan informasi ruang ditingkat provinsi adalah 100% pada Tahun 2023, hal ini berarti bahwa pada Tahun 2023 masyarakat sudah dapat mengakses informasi mengenai penataan ruang provinsi khususnya melalui peta RTRW provinsi.

Tabel III.2.10.a Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Informasi Ruang

No	Indikator	2022	2023		Capaian 2023 (%)
		Realisasi (%)	Target	Realisasi (%)	
11.	Jumlah RTR Provinsi/Kab/Kota di Kalimantan Tengah (Perda/Perkada)	6	9	9	100
12.	Jumlah Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah (Kabupaten/kota)	14	14	14	100
13.	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (Persentase)	50	55	55	100
14.	Jumlah Peta Analog dan Digital tentang Rencana Tata Ruang dan Tematik (Informasi)	60	60	60	100

Dari tabel diatas didapat dari informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (RTRW-P) berjumlah 3 (tiga) jenis peta yaitu :

1. Peta Rencana Struktur Ruang
2. Peta Rencana Pola Ruang
3. Peta Rencana Kawasan Strategis, yang terdiri dari:
  - Peta Kawasan Strategis Ekonomi
  - Peta Kawasan Strategis Sosial Budaya
  - Peta Kawasan Strategis dan Daya Dukung Lingkungan Hidup
  - Peta Kawasan Strategis Pendayagunaan SDA/Teknologi Tinggi
  - Peta Kawasan Strategis Perlindungan Keanekaragaman Hayati

#### 4. BIDANG SUMBER DAYA AIR

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di Provinsi Kalimantan Tengah yang meliputi Perencanaan Teknis, Pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, danau, waduk, bendung, situ, embung dan tampungan air lainnya, irigasi, air tanah, air baku, rawa, tambak dan pesisir pantai.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, bahwa pengelolaan di bidang Sumber Daya Air terdiri dari 3 (tiga) aspek yaitu Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air dan Pengendalian Daya Rusak Air. Adapun aspek konservasi dan pendayagunaan sumber daya air khususnya yang meliputi penyediaan air untuk air irigasi bagi pertanian dan air baku untuk kebutuhan masyarakat desa serta aspek pengendalian daya rusak air dalam rangka mengendalikan daya rusak air untuk melindungi permukiman sekitarnya dan infrastruktur lainnya.

##### III.2.4.11 Sasaran Meningkatnya pengelolaan jaringan irigasi dan konservasi Sumber Daya Air yang berkelanjutan

**Tabel III.2.4.11.a Target dan Realisasi Kinerja Meningkatnya Prosentase jaringan Irigasi dalam kondisi baik**

No	Indikator	2022	2023		Capaian 2023 (%)
		Realisasi (%)	Target	Realisasi (%)	
15.	Rasio Jaringan Irigasi (%)	24	24,49	24,49	100
16.	Persentase Irigasi Kewenangan Provinsi dalam kondisi baik (%)	77,45	77,56	77,56	100

Pada tabel III.2.4.11.a target dan realisasi kinerja meningkatnya prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik diatas berdasarkan pada rumus IKU untuk perhitungan rasio jaringan irigasi yaitu Luas irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting dibagi Luas irigasi kewenangan provinsi dikali 100% persentase

Irigasi Kewenangan Provinsi dalam kondisi baik (%) yaitu kondisi Irigasi kewenangan provinsi dalam kondisi baik dibagi Luas irigasi kewenangan provinsi dikali 100%. Pada Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) target dan realisasi kinerja tahun 2022 dan 2023 sudah mencapai 100%.

Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1.000 Ha sampai 3.000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa target 16.652 Ha realisasi 16.587 Ha capaian 99,61 % di wilayah Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Seruyan karena adanya refocusing.

Pada Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1.000 Ha sampai 3.000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa target 10.000 Ha realisasi 9.600 Ha capaian 96,00 % di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Kapuas karena adanya refocusing. Operasi dan Pemeliharaan Bendung di Tampa Kabupaten Barito Timur target 1 buah realisasi 1 buah capaian 100,00 %. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku dengan target 3 Unit realisasi 3 Unit capaian 100,00 %.

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS. Kewenangan Provinsi telah dilakukan Inventarisasi Jaringan Irigasi/Rawa dengan target 1 Laporan realisasi 1 Laporan capaian 100,00 %. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi dengan target 160 orang realisasi 160 orang capaian 100,00 %. Sub Kegiatan Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS. Kewenangan Provinsi OP Hidrologi dengan target 1 Laporan realisasi 1 Laporan capaian 100,00 %. Sub Kegiatan Pembangunan Pintu Air dengan target 16 Buah realisasi 16 Buah capaian 100,00 %. Sub Kegiatan Pembangunan Breakwater dengan target 113 M realisasi 113 M capaian 100%.

## 5. BIDANG JASA KONSTRUKSI

### III.2.12 Sasaran Terlaksananya pelatihan bagi masyarakat jasa konstruksi

Capaian Terlaksananya pelatihan bagi masyarakat jasa konstruksi dapat dilihat pada Tabel III.2.12.a berikut:

**Tabel III.2.12.a Target dan Realisasi Kinerja Terlaksananya pelatihan bagi masyarakat jasa konstruksi**

No	Indikator	2022	2023		Capaian 2023 (%)
		Realisasi (orang)	Target	Realisasi (orang)	
17.	Terlaksananya pelatihan bagi masyarakat jasa konstruksi	380 Orang	310 Orang	1,248	402,58

Berdasarkan Tabel III.2.12.a di atas bahwa pelatihan bagi masyarakat jasa konstruksi terlaksana yaitu target 310 Orang, dan sesuai target semua terlaksanan dan memenuhi capaian 310 orang yang terlatih, total capaian sampai dengan tahun 2023 yaitu 1248 orang masyarakat jasa konstruksi terlatih. Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 ada peningkatan capaian hingga 402,58 %.

### III.3 AKUNTABILITAS ANGGARAN

Pagu anggaran Belanja Langsung Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 Rp. 1,284.495.891.186,-. Penyerapan anggaran menunjukkan hasil yang baik yaitu sebesar 93,01 % dengan nilai sebesar 1.194.660.136.959,-.

**Tabel III.3.1.a Target/Pagu dan Realisasi Keuangan Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah**

No.	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi %
Belanja Tidak Langsung	23.690.550.135,87	20.649.147.168,00	87,16
Belanja Langsung	1.260.805.341.050,00	1.174.010.989.791,00	91.40
Jumlah BTL + BL	1.284.495.891.186,00	1.194.660.136.959,00	93.01

Perbandingan realisasi keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada Tabel III.3.1.b berikut:

**Tabel III.3.1.b Realisasi Keuangan Sumber Dana APBD-P Tahun 2022 dan APBD-P Tahun 2023 Dinas PUPR Provinsi Kalteng**

No	Bidang	Tahun 2022			Tahun 2023		
		DANA DPPA TOTAL	REALISASI KEUANGAN		DANA DPPA TOTAL	REALISASI KEUANGAN	
			(Rp)	(%)		(Rp)	(%)
1.	Sumber Daya Air	58.777.325.000,00	53.211.693.354,00	90,53	61.710.472.040,00	61.232.654.147,00	99,23
2.	Bina Marga	786.805.479.500,00	744.875.233.233,00	94,67	670.939.154.235,00	610.483.110.877,00	72,73
3.	Cipta Karya	185.096.845.000,00	172.036.533.693,00	92,94	500.234.300.158,00	480.479.760.227,00	96,05
4.	Tata Ruang	3.152.661.000,00	2.044.645.722,00	64,85	3.000.000.000,00	2.294.490.423,00	75,86
5.	Sekretariat	39.962.430.622,00	32.785.066.645,00	82,04	21.421.414.617,00	16.250.460.371,00	76,48
6.	Jasa Konstruksi	3.154.300.000,00	3.120.229.374,00	98,92	2.300.000.000,00	2.234.436.448,00	97,15
7.	UPT Lab. Bahan Konstruksi	1.700.000.000,00	1.440.065.650,00	84,71	1.200.000.000,00	1.036.077.298,00	86,34
	<b>Total Rp.</b>	<b>1.078.649.041.122,00</b>	<b>1.009.513.467.671,00</b>	<b>93,59</b>	<b>1.284.495.891.186,00</b>	<b>1.194.660.136.959,00</b>	<b>93,01</b>

# BAB IV PENUTUP

## IV.1 Kesimpulan

Penyelenggaraan program kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum pada Tahun Anggaran 2023 merupakan Tahun ketiga dari Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.

**Tabel IV.1 Capaian Kinerja Tahun 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALI - SASI	PERSE N-TASE
1	Meningkatnya Konektivitas antar daerah	Persentase jalan dalam kondisi mantap (%)	85,61	85,60	99,99
2	Meningkatkan kondisi kemantapan jalan provinsi dan kab/kota.	- Proporsi panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi baik	0,43	0,43	99,77
3	Meningkatkan aksesibilitas menuju simpul transportasi, fasilitas-fasilitas pelayanan dasar publik dan pusat-pusat perekonomian daerah.	- Persentase jalan provinsi dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )	85,61	43,14	99,79
4	Persentase akses air minum layak	- Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak (%)	95,28	77,72	81,57
5	Infrastruktur Persampahan yang dibangun /ditingkatkan	- Jumlah Infrastruktur Persampahan yang terbangun dan ditingkatkan (unit)	3	1,00	33,33
6	Persentase akses sanitasi layak	- Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses sanitasi Layak (%)	76	86,91	114,36
7	Panjang drainase yang dibangun/ditingkatkan	- Panjang Drainase yang dibangun / ditingkatkan (meter)	3000	2287,33	76,24
8	Pengembangan Kawasan pada Daerah Strategis Provinsi yang terbangun dan terselenggara infrastrukturnya	- Jumlah penyelenggaraan infrastruktur permukiman di Kawasan Strategis Provinsi (kawasan)	4	5,00	125,00
9	Bangunan gedung Strategis Provinsi	- Jumlah Bangunan Gedung Strategis Provinsi yang dibangun	8	6,00	75,00

	yang dibangun dan ditingkatkan	dan ditingkatkan (unit)			
10	Bangunan dan lingkungan di Kawasan Strategis Provinsi yang tertata dengan baik	- Jumlah Bangunan beserta Lingkungannya yang terbangun dan dikelola dengan baik (unit)	7	9,00	128,57
11	Meningkatnya fungsi tata ruang wilayah melalui perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	- Jumlah RTR Provinsi/Kab/Kota di Kalimantan Tengah (Perda/Perkada)	9 Perda/Perkada	13	144,44
		- Jumlah Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah (Kabupaten/kota)	14 Kabupaten/kota	14,00	100,00
		- Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (Persentase)	55 %	55	100,00
		- Jumlah Peta Analog dan Digital tentang Rencana Tata Ruang dan Tematik (Informasi)	60 Informasi	60	100,00
12	Meningkatnya pengelolaan Irigasi dan konservasi SDA yang berkelanjutan	- Rasio Jaringan Irigasi (%)	24,49	24	100,00
		- Persentase Irigasi Kewenangan Provinsi dalam kondisi baik (%)	77,56	77,45	100,00
13	Terlaksananya pelatihan bagi masyarakat jasa konstruksi	- Jumlah Masyarakat Jasa Konstruksi yang Terlatih (orang)	1080 orang	1248	115,56

Berdasarkan Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan **13 sasaran strategis dengan 17 indikator** keberhasilan, dengan capaian kinerja rata-rata **99,62 %** untuk keuangan **81,64%** dengan tingkat kinerja baik. Capaian indikator kinerja pada tahun 2023 lebih baik dari tahun 2022 yaitu **91,38%**. Walaupun ada beberapa indikator kinerja yang belum mencapai **100%**, namun apabila dibandingkan dengan tahun 2022 capaian mengalami peningkatan.

Sebagai bahan evaluasi pada tahun anggaran berikutnya dalam rangka meningkatkan eksistensi dan optimalisasi peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu unsur pelaksana pembangunan khususnya di bidang pekerjaan umum di daerah, maka dipandang

perlu dilakukan langkah-langkah antisipatif dalam upaya-upaya perbaikan dan peningkatan kinerja untuk memenuhi perbaikan pelayanan kepada masyarakat, antara lain:

1. Menyusun pohon kinerja yang menggambarkan hubungan kinerja yang legkap pada setiap jenjang jabatan;
2. Menyusun dokumen Proses Bisnis yang bisa menggambarkan hubungan antar bidang/fungsi yang berkaitan dalam pencapaian kinerja;
3. Membuat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja;
4. Melakukan pengumpulan data kinerja dan capaian kinerja dengan menggunakan teknologi informasi (Aplikasi) untuk memudahkan pengukuran kinerja secara langsung;
5. Melakukan pengumpulan data kinerja sebagai dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan dan penempatan/penghapusan jabatan baik strukturan maupun fungsional;
6. Melaksanakan evaluasi secara periodik (triwulan) dalam rangka pemantauan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatan dalam rangka menilai keberhasilan pencapaian kinerja dan memberikan rekomendasi perbaikan manajemen;
7. Melakukan pendokumentasian atas reuiu internal terhadap capaian kinerja sebelum ditetapkan dalam laporan kinerja, dengan memanfaatkan rencana aksi yang telah disusun;
8. Optimalisasi fungsi, monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan hendaknya sedini mungkin dapat dilakukan upaya-upaya pemecahan terhadap program dan kegiatan-kegiatan yang di nilai akan terhambat pelaksanaannya, sebaiknya sudah dapat diantisipasi sejak tahap perencanaan kegiatan;
9. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah kegiatan yang telah memiliki dokumen perencanaan teknis yang telah dibuat di tahun anggaran sebelumnya, sehingga penganggaran kegiatan dapat *lebih terencana dan terukur* sehingga *output kegiatan dapat tercapai* bahkan melampaui target yang telah ditetapkan;
10. *Meningkatkan koordinasi secara intern, sektoral, maupun lintas sektor secara berkala* sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan dan

kendala dalam pencapaian kinerja untuk selanjutnya dapat diambil langkah dan staretegi untuk meminimalisir dan mengatasi permasalahan yang dihadapi, sehingga nantinya Dinas Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan dapat berperan secara lebih baik, optimal dan profesional dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah.

Dari hasil evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 diharapkan menjadi acuan untuk menginventarisasi keberhasilan dan permasalahan-permasalahan yang ada, sehingga dapat dimanfaatkan untuk proses perencanaan selanjutnya dan akan memberikan kontribusi positif bagi pelaksanaan program kegiatan pada tahun berikutnya, yang akan dilaporkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Letjend. S. Parman No. 03 Telepon (0536) 3221150  
PALANGKA RAYA 73111

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. SHALAHUDDIN, ST., MT

Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. SUGIANTO SABRAN., S.IP

Jabatan : GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 25 Januari 2023

Pihak Kedua  
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Pihak Pertama  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :  
  
**H. SUGIANTO SABRAN, S.IP**

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :  
  
**H. SHALAHUDDIN, ST., MT**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197107211998031008

## LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Konektivitas antar daerah	- Persentase jalan dalam kondisi mantap (%)	85,61 %
2	Meningkatkan kondisi kemantapan jalan provinsi dan kab/kota.	- Proporsi panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi baik	43,20 %
3	Meningkatkan aksesibilitas menuju simpul transportasi, fasilitas-fasilitas pelayanan dasar publik dan pusat-pusat perekonomian daerah.	- Persentase jalan provinsi dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )	85,61 %
4	Persentase akses air minum layak	- Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak (%)	95,28 %
5	Infrastruktur Persampahan yang dibangun /ditingkatkan	- Jumlah Infrastruktur Persampahan yang terbangun dan ditingkatkan (unit)	3 unit
6	Persentase akses sanitasi layak	- Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses sanitasi Layak (%)	76 %
7	Panjang drainase yang dibangun/ditingkatkan	- Panjang Drainase yang dibangun / ditingkatkan (meter)	3.000 meter
8	Pengembangan Kawasan pada Daerah Strategis Provinsi yang terbangun dan terselenggara infrastrukturnya	- Jumlah penyelenggaraan infrastruktur permukiman di Kawasan Strategis Provinsi (kawasan)	4 kawasan
9	Bangunan gedung Strategis Provinsi yang dibangun dan ditingkatkan	- Jumlah Bangunan Gedung Strategis Provinsi yang dibangun dan ditingkatkan (unit)	8 unit
10	Bangunan dan lingkungan di Kawasan Strategis Provinsi yang tertata dengan baik	- Jumlah Bangunan beserta Lingkungannya yang terbangun dan terkelola dengan baik (unit)	7 unit
11	Meningkatnya fungsi tata ruang wilayah melalui perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	- Jumlah RTR Provinsi/Kab/Kota di Kalimantan Tengah (Perda/Perkada)	9 Perda/Perkada
12		- Jumlah Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah (Kabupaten/kota)	14 Kabupaten/kota
13		- Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (Persentase)	55 %
14		- Jumlah Peta Analog dan Digital tentang Rencana Tata Ruang dan Tematik (Informasi)	60 Informasi
15	Meningkatnya pengelolaan Irigasi dan konservasi SDA yang berkelanjutan	- Rasio Jaringan Irigasi (%)	24,49 %
16		- Persentase Irigasi Kewenangan Provinsi dalam kondisi baik (%)	77,56 %

17	Tertindakannya pelatihan bagi masyarakat jasa konstruksi	- Jumlah Masyarakat Jasa Konstruksi yang Terlatih (orang)	310 orang
----	--	---	-----------

	Program		Anggaran
1	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp	720.498.696.036
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp	65.530.000.000
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp	3.000.000.000
4	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp	2.000.000.000
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp	2.000.000.000
6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp	7.700.000.000
7	Program Pengembangan Permukiman	Rp	108.759.373.500
8	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp	361.185.869.000
9	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp	134.493.386.000
10	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp	3.000.000.000
11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp	2.300.000.000

Palangka Raya, 25 Januari 2023

Pihak Kedua  
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Pihak Pertama  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :  
  
**H. SUGIANTO SABRAN, S.IP**

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :  
  
H. SHALAHUDDIN, ST., MT  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197107211998031008



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Letjen S. Parman No. 03 Telepon (0536) 3221150  
PALANGKA RAYA 73111

---

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. SHALAHUDDIN, ST., MT  
Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. SUGIANTO SABRAN., S.IP  
Jabatan : GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik maka perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026 sebagaimana terlampir.

Demikian Penetapan Indikator Kinerja Utama ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan kinerja.

Palangka Raya, 25 Januari 2023

Pihak Kedua  
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Pihak Pertama  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :  
  
**H. SUGIANTO SABRAN, S.IP**

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :  
  
H. SHALAHUDDIN, ST., MT  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197107211998031008

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

### DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**Tugas dan Fungsi :**

**Tugas :** Membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah.

**Fungsi :** Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Pembinaan dan penyusunan perencanaan dan program;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan pengembangan konstruksi;
- 4) Pembinaan dan pelaksanaan pengembangan tata ruang;
- 5) Pemberian rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pengawasan;
- 6) Penyelenggaraan urusan Kesekretariatan Dinas; dan
- 7) Pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	meningkatnya jalan dalam kondisi mantap	Persentase jalan dalam kondisi mantap (%)	$\frac{\text{Panjang jalan provinsi kondisi baik (Km)}}{\text{Panjang jalan provinsi seluruhnya (Km)}}$	- Survey - Data jaringan irigasi di kabupaten - Data diolah di Dinas PUPR
2	meningkatnya panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi baik	Proporsi panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap (Km)}}{\text{Panjang jalan provinsi seluruhnya (Km)}} \times 100 \%$	- Survey - Data diolah di Dinas PUPR
3	meningkatnya jalan provinsi dalam kondisi baik	Persentase jalan provinsi dalam kondisi baik ( > 40 KM/ Jam )	$\frac{\text{Panjang jalan provinsi dalam kondisi baik (Km)}}{\text{Panjang jalan provinsi seluruhnya (Km)}} \times 100 \%$	- Survey - Data diolah di Dinas PUPR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
4	Persentase akses air minum layak	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak (%)	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga berakses air minum layak}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	- Data BPS - Survey - Data diolah di Dinas PUPR
5	Infrastruktur Persampahan yang dibangun/ditingkatkan	Jumlah Infrastruktur Persampahan yang terbangun dan ditingkatkan (unit)	Jumlah Infrastruktur Persampahan yang terbangun dan ditingkatkan	- Data BPS - Survey - Data diolah di Dinas PUPR
6	Persentase akses sanitasi layak	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses sanitasi Layak (%)	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga berakses sanitasi layak}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	- Data BPS - Survey - Data diolah di Dinas PUPR
7	Panjang drainase yang dibangun/ditingkatkan	Panjang Drainase yang dibangun / ditingkatkan (meter)	Jumlah Panjang Drainase yang dibangun dan ditingkatkan	- Survey - Data diolah di Dinas PUPR
8	Pengembangan Kawasan pada Daerah Strategis Provinsi yang terbangun dan terselenggara infrastrukturnya	Jumlah penyelenggaraan infrastruktur permukiman di Kawasan Strategis Provinsi (kawasan)	Jumlah penyelenggaraan infrastruktur permukiman di Kawasan Strategis Provinsi	- Survey - Data diolah di Dinas PUPR
9	Bangunan gedung Strategis Provinsi yang dibangun dan ditingkatkan	Jumlah Bangunan Gedung Strategis Provinsi yang dibangun dan ditingkatkan (unit)	Jumlah Bangunan Gedung Strategis Provinsi yang dibangun dan ditingkatkan	- Survey - Data diolah di Dinas PUPR
10	Bangunan dan lingkungan di Kawasan Strategis Provinsi yang tertata dengan baik	Jumlah Bangunan beserta Lingkungannya yang terbangun dan terkelola dengan baik (unit)	Jumlah Bangunan beserta Lingkungannya yang terbangun dan terkelola dengan baik	- Survey - Data diolah di Dinas PUPR
11	Meningkatnya fungsi tata ruang wilayah melalui perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Jumlah RTR Provinsi/Kab/Kota di Kalimantan Tengah (Perda/Perkada)	Jumlah RTR Provinsi/Kab/Kota di Kalimantan Tengah yang disahkan (Perda/Perkada)	- Survey - Data diolah di Dinas PUPR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
12		Jumlah Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah (Kabupaten/kota)	Jumlah Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah (Kabupaten/kota)	- Survey - Data diolah di Dinas PUPR
13		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (Persentase)	$\frac{\text{Luas pemanfaatan ruang A yang sesuai peruntukannya}}{\text{Luas rencana peruntukan ruang A}} \times 100$ (Persentase)	- Survey - Data diolah di Dinas PUPR
14		Jumlah Peta Analog dan Digital tentang Rencana Tata Ruang dan Tematik (Informasi)	Jumlah Peta Analog dan Digital tentang Rencana Tata Ruang dan Tematik (Informasi)	- Survey - Data diolah di Dinas PUPR
15	Meningkatnya pengelolaan jaringan irigasi dan konservasi Sumber Daya Air yang berkelanjutan	Rasio Jaringan Irigasi (%)	$\frac{\text{Panjang jaringan fungsional (m)}}{\text{Luas jaringan kewenangan provinsi (ha)}} \times 100\%$	- Survey - Data diolah di Dinas PUPR
16		Persentase Irigasi Kewenangan Provinsi dalam kondisi baik (%)	$\frac{\text{Luas jaringan kondisi baik (Ha)}}{\text{Luas jaringan kewenangan provinsi (Ha)}} \times 100\%$	- Survey - Data diolah di Dinas PUPR
17	Terlaksananya pelatihan bagi masyarakat jasa konstruksi	Jumlah Masyarakat Jasa Konstruksi yang Terlatih (orang)	Jumlah orang yang terlatih (orang)	- Survey - Data diolah di Dinas PUPR

Palangka Raya, 25 Januari 2023

Pihak Kedua  
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Pihak Pertama  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :  
  
**H. SUGIANTO SABRAN, S.IP**

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :  
  
**H. SHALAHUDDIN, ST., MT**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197107211998031008